

**PARTISIPASI POLITIK TERHADAP ISU-ISU  
KONTEMPORER (STUDI KASUS MAHASISWA DI  
KOTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar S.Sos. Sarjana S1 PrograStudi Ilmu Politik**

**Oleh :**

**M. SHANDIKA PUTRA**

**1657020069**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
TAHUN 2020**




## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

### UJIAN MUNAQOSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara M.Shandika Putra , Nim. 1657020069 yang berjudul *Partisipasi Politik Terhadap Isu-Isu Kontemporer (Studi Kasus Mahasiswa di kota Palembang)* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang


Palembang, 09 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Taufik Akhyar, M.Si  
NIP.197109132000031003

Pembimbing II



Afif Musthofa Kawwami, M.Sos  
NIDN.2027029302

## PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : M.Shandika Putra  
Nim : 1617020069  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : Partisipasi Politik Terhadap Isu-Isu Kontemporer (Studi Kasus Mahasiswa di kota Palembang)

Telah dimunaqosahkan dalam sidang *Online* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Rabu / 04 Agustus 2021  
Tempat : Di Rumah Via *Online (daring)* melalui Aplikasi Zoom.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

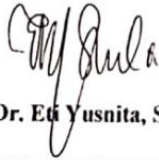
Palembang, 09 Agustus 2021



Dr. H. Izomiddin, M.A  
NIP. 196206201988031001

### TIM PENGUJI

KETUA



Dr. Eti Yusnita, S.Ag M.Hi

NIP. 197409242007012016

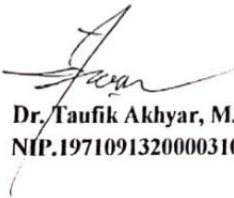
SEKRETARIS



Ryllian Chandra Eka Viana, MA

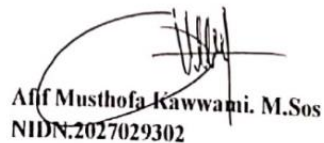
NIP. 198604052019031011

PENGUJI 1



Dr. Taufik Akhyar, M.Si  
NIP.197109132000031003

PENGUJI 2



Aiff Musthofa Kawwami, M.Sos  
NIDN.2027029302

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Shandika Putra

Nim : 1657020069

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Partisipasi Politik terhadap isu – isu kontemporer (Studi kasus Mahasiswa dikota Palembang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Palembang, 28 Agustus 2021



M.Shandika Putra



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

**Jangan pernah jadi orang yang merasa bisa. Jadilah orang yang  
pandai merasa.**

**Kalau orang lain saja bisa, kenapa kita tidak.**

### **Persembahan**

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT atas semua keridohnya serta izinnya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya terimakasih Bapak Supeno dan ibu Mardiana yang sangat kucintai dan ku sayangi, yang selalu mendoakan serta berusaha untuk memberikan yang terbaik untukku. Dan tidak lupa pula adikku tersayang M.Alfarbi Sahel, Najwa Afifah Syakira dan M.Ghalib Mubarak.
3. Dan terima kasih juga untuk Mutiara Agriani Miranda yang telah menemani perjuangan saya dari kita SMA hingga lulus kuliah. Hingga selanjutnya kita tetap bersama sampai mau memisahkan kita.
4. Bapak Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum., Hatta Azzuhri, M. Si. selaku pembimbing skripsi. Bapak Dr.Taufik Akhyar, M. Si. dan bapak Affif Mustofa Kawwami M.Sos selaku penguji saya, terimakasih karena sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga yang selalu memberikan semangat semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Sahabat Sejak SMA Sahabat Seiman Terutama Aldi,Wira dan Billy yang selalu mengajak saya Nongki saat ingin mengerjakan Skripsi

7. Teman seperjuanganku mahasiswa Ilmu Politik B 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Almamater tercinta Uin Raden Fattah Palembang.
9. Fakultas tercinta Ilmu Sosial dan Ilmu politik.



## **ABSTRAK**

Mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change, sering kali mengangkat isu politik tertentu yang berhubungan dengan masyarakat. Di laporan ini, akan dibahas bagaimana partisipasi politik mahasiswa terhadap isu– isu politik kontemporer dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa terhadap isu – isu politik kontemporer.

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang memberikan gambaran serta deskripsi berdasarkan hasil analisis yang berdasarkan pada kenyataan dan realitas yang ada di lapangan, dimana penelitian menggunakan teknik observasi ke mahasiswa palembang, wawancara dan juga dokumentasi.

Setelah mendapatkan data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Di penelitian ini, dijelaskan mengenai partisipasi aktif dari mahasiswa melalui Gerakan mahasiswa untuk menghadap isu–isu kontemporer yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa untuk Gerakan mahasiswa di Palembang memiliki karakter dan kepekaan terhadap isu – isu kontemporer dan juga peneliti berharap mahasiswa dapat menyeimbangkan antara peran agent of change dan mahasiswa yang bertanggungjawabakan pendidikannya.

Kata kunci : Isu, Politik, dan Kontemporer.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah SWT., berkat segala nikmat kesehatan, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi politik terhadap isu isu kontemporer (studi kasus mahasiswa dikota Palembang)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si., selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang .
4. Ainur Ropik, M.Si., selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus pembimbing 1 saya.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si., selaku Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus penguji 1 saya.
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi, sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang .
7. Rylia Candra Eka Viana, MA sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I saya.
9. Hatta Azzuhri, M. Si sebagai Dosen Penguji II saya.
10. Dosen-dosen FISIP UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
12. Orang tuaku yang telah mendidik, selalu mendo'akan, memberi dukungan dan semangat kepada penulis hingga saat ini.
13. Keluargaku dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan

skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna kesempurnaan di masa yang akan datang. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun dikemudian hari.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, 25 Agustus2021

M.Shandika Putra  
NIM. 1657020069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian .....	9
D.Kegunaan Penelitian .....	9
E.Tinjauan Pustaka.....	10
F.Kerangka Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian .....	16
1.Metode Penelitian atau Pendekatan.....	16
2.Data dan Jenis Data .....	16
3.Teknik Pengumpulan Data .....	17
a.Observasi.....	17
b.Wawancara .....	17
c.Dokumentasi .....	18
d.Lokasi Penelitian .....	18
4.Teknik Analisa Data.....	18
a.Kondensasi Data .....	19
b.Penyajian Data .....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20

**BAB II PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA ....Error! Bookmark not defined.23**

- A. Konsep Partisipasi Politik.....23
- B. Bentuk Partisipasi Politik .....25
- C. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik .....29
- D. Fungsi dan Tujuan Partisipasi Politik.....30
- E. Isu Kontemporer .....31

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....**

- A. Kota Palembang.....33
- B. Universitas di Sumatra Selatan.....41

**BAB IV PEMBAHASAN.....49**

- A. Partisipasi Politik Mahasiswa terhadap Isu Kontemporer.....55
- B. Pembahasan Analisis .....63
- C. Faktor -faktor Partisipasi Mahasiswa terhadap Isu Kontemporer.....65

**BAB V KESIMPULAN.....87**

**DAFTAR PUSTAKA.....91**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam melakukan suatu program kegiatan yang sedang dijalankan merupakan pengertian dari partisipasi. Keterlibatan tersebut dapat secara pasif maupun aktif. Tepatnya, partisipasi dapat dikatakan sebagai keterlibatan kelompok individu masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan ataupun program yang sedang diselenggarakan, baik itu diluar maupun di dalam kendali keprofesiannya (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No 2).

Dalam kehidupan negara yang berpolitik, maka dikenal istilah partisipasi politik yang dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seorang individu dalam masyarakat dalam kegiatan politik di negaranya. Partisipasi politik tersebut contohnya seperti dalam pemilu, dengan memberikan hak suara dalam pemilihan umum, maka individu tersebut sudah memiliki partisipasi politik. Partisipasi politik dalam bentuk sekecil apapun, tentu saja memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah (*public policy*) (Herbert McClosky, 1972). Contoh lain yang dapat dilakukan individu dalam partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan hubungan dan lobi dengan pemerintah setempat. Selain itu, seorang calon legislatif yang terpilih dalam pemilihan umum, juga dapat dikatakan sebagai individu yang memiliki partisipasi politik dalam artian yang lebih luas.

Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah bentuk system politik suatu Negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa, kebanyakan rezim menyatakan dirinya demokratis

dan rezim yang tidak demokratis selalu berusaha menyatakan diri menuju demokrasi, meskipun seluruhnya tidak disambut baik oleh pendukung demokrasi. (Prof. Dr. Anwar Arifin, 2015: 154).

Negara yang memiliki sistem politik demokrasi mengharuskan pengantian pemimpin melalui pemilihan suara dari seluruh masyarakat yang telah sesuai dengan standar pemilu, yaitu masyarakat yang telah berumur 17 tahun. Pemilihan suara seperti ini merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan negara demokratis. Dibeberapa negara yang tidak menganut sistem negara demokratis seringkali mengalami kegagalan rezim, seperti pada saat orde baru. Dimana pada saat itu, Presiden Soeharto telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Hal ini tentu saja berdampak kepada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan perlahan berubah menjadi rezim otoriter. Rezim otoriter tersebut mendominasi kehidupan politik hingga disebut sebagai *overpower*. Selain perjuangan dan perseteruan partai politik yang adu kuat pengaruhnya ialah menjadikan perseteruan tersebut sebagai tantangan era Orde Lama. (Soebandrio, 2001: 60).

Dalam perkembangan sistem politik di beberapa negara, tentu saja mengalami proses yang cukup panjang bahkan sering kali terjadi kudeta (*coup d'etat*). Dalam peralihan kekuasaan, masyarakat biasanya Peralihan kepemimpinan melalui kudeta biasanya terlibat dalam hal ini. Selain membutuhkan massa yang cukup banyak, dalam kudeta juga dibutuhkan persenjataan yang lengkap, karenanya kekuatan bantuan militer juga tidak boleh diragukan.

Selain beberapa negara di dunia, Indonesia dalam perkembangannya juga mengalami tahap-tahap pergantian sistem pemerintahan. Pemilihan umum dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan, yaitu peralihan kekuasaan. Namun, selain



pemilihan umum, peralihan kekuasaan juga mengalami berbagai kudeta. 15 tahun pasca kemerdekaan merupakan kurun waktu dimana politik mengganas dan berbagai intrik yang dilakukan untuk memperebutkan kekuasaan. Salah satu contoh peristiwa yang terjadi adalah perista G30S/PKI. Gerakan ini memakan cukup banyak korban, termasuk 9 perwira, dan masih banyak korban yang tidak bersalah lainnya (termasuk diantaranya adalah Ade Irma Suryani yang saat itu berumur masih sangat belia) (Soebandrio, 2001: 61).

Berdasarkan UUD 1945, pengertian mahasiswa sebagaimana tercantum dalam UU no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Di Indonesia, mahasiswa memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, oleh karenanya mahasiswa mendapat berbagai yang menggelegaryaitu *agent of change*, *director of change*, *creative minority*, calon pemimpin bangsa dan lain sebagainya. Begitu banyak partisipasi politik yang telah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, sehingga membawa mahasiswa pada posisi terhormat, yaitu pahlawan pada kelasnya dan juga disebut sebagai pilar demokrasi (Dudih Sutrisman, 2019: 115).

Munculnya mahasiswa sebagai *agent of change* sering kali mengangkat isu politik tertentu, sangatlah jelas berkaitan dengan munculnya persoalan tentang hal tersebut dimasyarakat. Di mata mereka hal tersebut seharusnya terselesaikan secepatnya dan jangan berlarut terlalu lama agar tidak merugikan "rakyat". Misalnya, ketika mahasiswa mengangat isu korupsi, hal demikian berarti adalah adanya ketidaksesuaian dalam sistem birokrasi dan kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan mengontrol keuangan negara. Isu demokratis dan reformasi total menunjukkan adanya kehendak baik

mahasiswa untuk turut ikut andil ambil bagian dalam perbaikan sistem politik yang ada di Indonesia yang nantinya akan memunculkan tanggung jawab yang besar Mahasiswa sebagai orang-orang yang bertindak yang akan memicu terjadinya sebuah perubahan (*Agent of change*).

Dalam *history block* Orde Baru, pikiran mahasiswa yang sekuler dan anti kiri memang lebih sesuai dengan pragmatism rezim politik orde baru. Perubahan politik elite memang melibatkan mahasiswa sebagaimana yang sudah ditunjukkan dari kejatuhan presiden Soekarno hingga naiknya Jenderal Soeharto ke tahta kepresidenan. (EnimSupriyanto, 1999 : 129). Pada era Soeharto disebut sebagai Antitesa dari rezim Soekarno, karena jangka waktu kepresidenan Soeharto yang terbilang cukup lama yaitu 32 tahun. Sementara pada masa pemerintahan Soekarno, perseteruan antar partai sangat sering terjadi karena ini adalah era yang di dominasi oleh perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat itu. Oleh karena sangat tidak jarang terjadi bentrok antar partai yang akan mencalonkan diri demi kekuasaan. Karena adanya kesenjangan dan perbedaan sistem yang jauh berbeda, maka semakin banyak bermunculan perlawanan-perlawanan yang dipelopori oleh mahasiswa. Demonstrasi yang pada awalnya hanya dilakukan di dalam kampus, berubah menjadi demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa dengan tegas menuntut perbaikan dan pembenahan perekonomian yang kian memburuk pada saat itu, berubah menjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Karena perjuangan besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa maka robohlah era pemerintahan Presiden Soeharto. Awal mula demonstrasi ini terjadi adalah karena Soeharto mengumumkan dirinya akan menjadi presiden kembali, setelah pemerintahannya yang sudah

sangat lama, hal ini dipengaruhi oleh terpilihnya Golkar sebagai pemenang pada pemilu tahun 1997 (kompas.com). Aksi demonstrasi yang diharapkan dapat berjalan dengan aman dan damai akhirnya berubah menjadi tragedi karena aparat menggunakan kekerasan untuk memukul mundur mahasiswa yang berjumlah puluhan ribu. Karena jumlah mahasiswa yang sangat banyak, akhirnya gedung DPR/MPR RI berhasil diduduki oleh mahasiswa. Posisi Soeharto semakin terhimpit saat itu karena Harmoko selaku ketua DPR/MPR RI meminta Soeharto menyerahkan jabatannya. Akan tetapi, walaupun sudah dalam keadaan terpojok, Soeharto masih mencoba untuk mempertahankan kekuasaannya. Beberapa cara yang dilakukan seperti menawarkan pembentukan tim transisi peralihan kekuasaan hingga pemilihan umum berikutnya.

Sekian banyak aksi demonstrasi yang dilakukan tentunya terdapat sisi kurang baik yang didapati. Mahasiswa sebagai kaum intelektual, tidak mencerminkan kepribadian yang baik dalam demonstrasi. Hal ini dikarenakan mereka merusak banyak fasilitas umum, seperti merusak jalan, menyegel SPBU, merusak lampu jalan, dan masih banyak lagi. Tentu saja hal ini bukan hal yang baik untuk dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan kaum civitas akademika. Bahkan hingga sekarang, setiap terdapat aksi demonstrasi yang cukup besar, seringkali terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan petugas keamanan baik polisi maupun tentara. Tak hanya itu, setelah demonstrasi selesai, antara mahasiswa dan polisi masih bersitegang saling menyalahkan. Mahasiswa menyalahkan petugas keamanan yang cenderung “kasar”, sementara aparat menyalahkan mahasiswa yang tidak bisa berdemonstrasi secara damai.

Apabila mahasiswa di zaman orde baru ditangkap karena mempertahankan ideologi dan pemikirannya yang berseberangan dan tidak sependapat dengan pemerintah. Inilah alasan mengapa mahasiswa disebut pembawa perubahan (*agent of change*), yaitu karena mereka berani mempertahankan dan menyampaikan aspirasi rakyat bahkan jika nyawa mereka menjadi taruhannya. Dan pada era tersebut pula lah, mahasiswa berhasil meraih simpati masyarakat. Lain halnya yang terjadi pada zaman demokrasi seperti sekarang ini, mahasiswa ditangkap karena demonstrasi yang dilakukan mengganggu ketertiban umum, memblokir jalan, serta melakukan tindakan anarkis lainnya. Selain itu, demonstrasi yang dilakukan saat ini telah dicemari dengan oknum-oknum yang memiliki kepentingan dan mengatasnamakan mahasiswa untuk membuat kekacauan.

Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 baik pilpres maupun pileg telah menimbulkan banyak masalah. Indikator ini bisa dilihat, dari sisi persiapan dan pelaksanaannya yang menimbulkan permasalahan di lapangan. Salah satu contoh masalah, temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan, sekitar 17 juta lebih warga belum mendapatkan undangan pencoblosan pemilu. Adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), yang sengaja mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Bawaslu juga menemukan, lebih dari 5.500 KPPS tidak netral karena mengarahkan calon tertentu. (Diakses melalui <https://suarapalu.com/pelaksanaan-pemilu-serentak-2019-dinilai-terburuk/> pada tanggal 20 Februari 2020).

Pada tahun 2019, setelah pemilu serentak selesai digelar, mulai muncul kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal, data-data hasil pemilu dimanipulasi, dan masih banyak kecurangan lainnya. Oleh

karena itu, masyarakat Indonesia seperti terbagi menjadi dua kubu, kubu pendukung capres A dan kubu pendukung capres B.

Kini gerakan mahasiswa seolah sepi tidak seperti gerakan mahasiswa reformasi 20 tahun lalu. Nilai-nilai perjuangan pun bergeser, dari memperjuangkan isu-isu kerakyatan (amanat reformasi) menjadi isu-isu yang menjurus kepentingan diri atau kelompok. Bisa dikatakan, kalangan mahasiswa tidak lagi memiliki musuh bersama. Memberantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) pun sudah tidak menjadi agenda yang menarik bagi mahasiswa. Tidak jarang kita melihat gerakan-gerakan mahasiswa sekarang dilakukan karena tren semata sehingga banyak aktivis-aktivis yang tidak memahami isu yang hendak mereka usung.

Berbeda dengan era 1990-an, gerakan mahasiswa selalu dikonstruksi berdasarkan ideologi yang jelas bahwa mahasiswa adalah agen perubahan sosial yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, bila ada potensi kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat, mencederai prinsip demokrasi dan tak sesuai aturan, mahasiswa yang mempunyai daya kritis yang cukup tajam, secara spontan melakukan kritisme secara cermat dan benar. Hal itu dilakukan tidak hanya melibatkan suatu elemen gerakan saja, tetapi melibatkan berbagai organ yang ada. Mereka sadar bahwa hanya dengan penyatuan ideologilah suatu gerakan bisa dilakukan secara masif.

Gerakan mahasiswa sekarang bertolak belakang dengan yang dulu. Gerakan mahasiswa sekarang cenderung dipengaruhi ideologi-ideologi tertentu dan kepentingan politik praktis. Tak heran jika gerakan mahasiswa muncul tidak dengan visi misi yang sama, justru sering terjadi konflik antara merkasendiri. Di era sekarang, kita jarang melihat gerakan mahasiswa yang berlatar belakang dari ideologi yang

sama dengan simbol-simbol organisasi gerakan mahasiswa yang bermacam-macam. Yang terjadi justru sebaliknya, warna bendera mahasiswa melambangkan suatu gerakan sekaligus mencerminkan variasi ideologi yang melandasi masing-masing gerakan itu. Kekuatan politik itulah yang kemudian menggerogoti ideologi dan kekuatan serta daya tawar gerakan mahasiswa, sehingga setiap upaya gerakan mahasiswa di tengah masyarakat kurang mendapat simpati dan dukungan.

Gerakan mahasiswa yang menonjol justru ideologi dan kekuatan politik tertentu. Itu di satu sisi. Pada sisi yang lain, tidak bisa lagi diartikan bahwa gerakan mahasiswa sekarang sering kali dijadikan komoditas suatu kekuatan dan keperluan tertentu. Kalau yang pertama mencerminkan adanya perselingkuhan dengan aliran politik tertentu, maka gerakan yang satu ini justru lepas dari ikatan mainstream ideologi politik, melainkan justru membuat perhitungan ekonomi dengan kelompok politik. Karena itu, bentuk gerakan ini pun dapat dikatakan lebih berbahaya dibanding sebelumnya karena gerakan mahasiswa itu telah mengalami pergeseran dan tanpa disadari status mahasiswa dari yang semula agen pembawa perubahan menjadi agen "bisnis" suatu kepentingan politik tertentu.

Perubahan status ini tentu saja memengaruhi pada, pergerakan mahasiswa itu sendiri. Gerakan mahasiswa era sekarang tidak lagi sebesar gerakan era 1990-an karena jumlah massanya telah "terkotak-kotak" dan berbeda aliranyang sangat berpengaruh terhadap strategi gerakan yang dibangun. Lemahnya strategi itu menyebabkan tidak jelasnya visi dan misi gerakan sendiri. Sehingga, sekaligus berakibat pada gagalnya perubahan yang hendak dicapai. Maka, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian

tentang ‘Partisipasi Politik Terhadap Isu-Isu Politik Kontemporer (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Palembang)’ demi menjaga keutuhan *bargaining*-nya, gerakan mahasiswa perlu adanya reorientasi dan rekonstruksi serta penyatuan visi dan misi kembali dengan mengusung suatu ideologi tunggal yang dapat memayungi setiap gerakan sebagaimana semestinya mahasiswa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diambil, yaitu:

1. Bagaimana Partisipasi Politik Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Politik Kontemporer di Kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Politik Mahasiswa Terhadap Isu-isu Politik Kontemporer di Kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui partisipasi politik mahasiswa terhadap Isu-isu Politik Kontemporer di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa terhadap Isu-isu Politik Kontemporer di Kota Palembang

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi ataupun informasi sebagai media pembelajaran mengenai sejarah dan pergerakan mahasiswa.

2. Memahami perbedaan dan penyebab pergerakan mahasiswa zaman orde baru dengan kontemporer.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Identitas merupakan hal yang mendasar dalam segi kehidupan manusia. Selain itu, identitas merupakan pengenalan utama ketika seseorang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. Sebagai data pendukung dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti juga mencari informasi melalui skripsi dan jurnal terdahulu dengan topik yang hampir sama. Selain itu, beberapa data juga didapatkan dari internet, jurnal, maupun e-book.

*Pertama*, penelitian Fuadi tahun 2014 yang berjudul “Citra Organisasi Pergerakan Mahasiswa Paska Reformasi Politik Indonesia”. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan proses perjuangan mahasiswa dengan menggunakan paradigma postpositivisme. Karena penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme, maka penelitian didasarkan pada keutuhan dan realitas dari objek penelitian. Adapun konsep penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh M. Linggar Anggoro. Konsep itu berisi; citra merupakan cerminan yang tidak selalu sama persis dengan kenyataan yang ada. Bahasan khusus dalam citra ini terbagi menjadi 5 bagian yaitu citra bayangan (*mirror image*), citra harapan (*wish image*) citra perusahaan (*corporate image*) dan citra majemuk (*multiple image*).

Penelitian ini menggabungkan pengukuran elemen dasar menurut Neilsen dan Elvinaro Ardianto, yaitu karakteristik dari aksesoris yang dipakai seseorang, *familiarity*, *values assesment* atau yang disebut nilai taksir, kualitas dari suatu produk barang atau jasa, inovasi yang memadai / banyaknya motivasi, nilai investasi jangka panjang, *finacial*



*healthness*, daya tarik terhadap bakat orang lain, komunikasi dan *responsibility* dalam menggunakan fasilitas yang diberikan perusahaan. Teknik *mix method* merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Artinya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian.

Responden dalam penelitian ini merupakan kelompok mahasiswa yang paham dan mengerti organisasi intrakampus seperti organisasi pergerakan mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi responden berjumlah 30 orang, dan semuanya berdomisili di kota Semarang, Jawa Tengah. 30 mahasiswa itu merupakan responden untuk penelitian dengan metode kuantitatif. Sementara, untuk metode kualitatif respondennya adalah orang-orang yang menjadi *stakeholder* di kampus tersebut, seperti dosen, dewan pimpinan kampus, pejabat setempat, dan juga pimpinan organisasi yang bersangkutan.

*Kedua*, (Pratama et al., 2018) ‘*peran organisasi gerakan nasional Indonesia (GMNI) dalam meningkatkan sikap nasionalisme*’. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan sesuatu hal secara sistematis, faktual, dan tepat. Objek dalam penelitian ini adalah pada organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Selain itu, analisis ini dilakukan berdasarkan data *real* yang ada di lapangan.

*Ketiga*, (Prawista, 2011), ‘*Gerakan Mahasiswa Makassar*’. Dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis perilaku kekerasan dalam unjuk rasa mahasiswa UNHAS. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana kekerasan yang dialami oleh

mahasiswa UNHAS ketika melakukan unjuk rasa. Selain itu, apa penyebab dari hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari rumusan masalah. Jadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah perilaku kekerasan dalam unjuk rasa mahasiswa UNHAS. Alasan mengapa hal ini dijadikan topik adalah karena tingkat kekerasan dan kerusakan fasilitas umum di lingkungan UNHAS jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi demonstrasi lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian studi kasus mengenai hal tersebut.

*Keempat*, (Indra & Aqar, 2015), "*Gerakan Mahasiswa Pasca Reformasi*". Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan hasil penelitian dan data-data yang telah di dapatkan. Selain itu, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari responden secara holistik. Responden yang diambil adalah responden yang mengerti akan konsep ilmu-ilmu sosial yang bersifat real. Penelitian ini juga mengadopsi ilmu-ilmu alam dan teori dalam organisasi gerakan mahasiswa setelah reformasi.

## **F. Kerangka Teori**

Secara teoritis Pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengetahui Gerakan Politik mahasiswa terhadap isu-isu politik kontemporer adalah melalui pendekatan teori-teori partisipasi politik. Penjelasan ini memusatkan perhatian berdasarkan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Yang dimaksud dari partisipasi politik adalah ikut andil dalam kegiatan politik yang sedang berlangsung dimana keterlibatan individu tersebut sedikit banyaknya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Contoh dari partisipasi politik itu sendiri adalah membayar pajak, mengajukan tuntutan, mengikuti pemilihan umum.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa partisipasi adalah aspek penting bagi negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi, seperti Indonesia. Dasar pemikiran dari demokrasi adalah persepsi yang mengatakan bahwa orang yang paling tahu mengenai apa yang baik dan buruk untuk dirinya, adalah orang itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpartisipasi politik. Pertama, yang dimaksudkan dengan partisipasi adalah perilaku dan tindakan di luar seseorang yang dapat diteliti bukan merupakan perilaku yang berorientasi pada sikap. Kedua, keputusan politik pemerintah bisa dipengaruhi melalui kegiatan yang diselenggarakan. Ketiga, konsep partisipasi politik adalah partisipasi yang berupa partisipasi efektif maupun partisipasi, keempat, baik gagal atau non-efektif. Kelima, partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan melalui perantara maupun tidak(Ramlansurbakti, 2010:179).

Pendapat yang lain menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah (Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, 1984: 4). Dalam partisipasi politik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Hutington dan Nelson menjelaskan bahwa keyakinan merupakan cakupan terbesar dari partisipasi. Artinya cakupan partisipasi bukan hanya berupa sikap-sikap. Mereka juga menjelaskan bahwa dalam partisipasi, sikap dan perasaan tidak bisa untuk dilibakan dalam mengambil keputusan politik. Kedua, individu yang berpartisipasi aktif adalah setiap masyarakat sipil yang ada di negara tersebut. Dalam hal ini, pemimpin-pemimpin negara, pemerintah, ataupun instansi yang berwenang untuk mengambil keputusan, bukan merupakan partisipasi politik, karena itu adalah tugas dasar yang sudah melekat untuk jabatan mereka.

Ketiga, setiap kegiatan partisipasi politik dapat dipastikan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi ataupun mengubah kebijakan pemerintah yang berwenang dalam suatu negara. Partisipasi dalam hal ini bertujuan untuk membujuk pemerintah secara halus untuk mengikuti keinginan masyarakat sipil. Keempat, kegiatan partisipasi politik, merupakan kegiatan yang bersifat relatif, karena belum tentu hasil dari partisipasi yang dilakukan dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat sipil. Dalam buku *Internasional Ensiklopedia of the Social Sciences*. (William a. Darity Jr, 2008:1178). Adapun setiap kegiatan yang berhubungan dengan politik, misalnya mengikuti pemilihan umum, ikut serta dalam kampanye, ataupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, maka itulah disebut partisipasi politik.

Selain Huntington dan Nelson, pendapat lain yaitu Resenstone dan Hansen juga menjelaskan secara teoritis dan mendetail bahwa individu atau orang-orang yang ikut serta dalam partisipasi biasanya memiliki kepentingan, namun ada juga yang meminta mereka untuk berpartisipasi langsung dalam mempengaruhi kebijakan publik. Cara yang biasanya digunakan untuk meminta seseorang untuk melakukan partisipasi politik bisa melalui perekrutan, dimobilisasi, maupun sukarelawan (*volunteer*), sehingga gerakan mereka terlebih tersistem dan teratur. Ide ini telah mereka gunakan untuk menyelesaikan studi yang cukup lama yaitu pada tahun 1956-1990 tepatnya di Amerika Serikat yang membahas banyak materi mengenai *participation* (William a. Darity Jr, 2008:1180).

Berdasarkan pengertian dari Resenstone dan Hansen, dapat diartikan bahwa fokus partisipasi politik adalah pada eksistensi seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara, apakah

ia telah ikut serta secara aktif atau belum dalam politik di negaranya. seperti yang di lakukan sekelompok masyarakat di kota Palembang yang ikut serta secara aktif memilih pemimpin, sehingga kota Palembang tersebut mendapat tingkat partisipasi yang tinggi lewat sebuah ekspresi politiknya.

Partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu kesadaran dan kepercayaan. Pertama, kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran dirinya akan partisipasi politik yang mengikatnya sebagai warga negara. Kesadaran politik merupakan kesadaran seseorang akan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, baik itu di lingkungan masyarakat, pemerintahan, politik, maupun dalam instansi lainnya. Sementara, rasa percaya terhadap pemerintahan ialah keyakinan yang dia miliki terhadap pemerintahan publik, hal ini juga mempengaruhi apakah ia dapat mempercayai pemerintah atau tidak (RamlanSurbakti, 2007:144)

Berdasarkan pendapat Ramlan Surbakti partisipasi digolongkan menjadi dua jenis yaitu partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Partisipasi aktif dimaksudkan adalah keikutsertaan seseorang secara langsung dalam setiap kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan politik, seperti mengajukan pendapat, menyampaikan inspirasi, serta hal-hal lain yang mengharuskan dia menyampaikan sesuatu secara langsung kepada pemerintah.

Sementara pengertian lain dari partisipasi pasif adalah seperti ketika seseorang mematuhi kebijakan pemerintah, membayar pajak, menaati lalu lintas. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan kebijakan pemerintah, namun tidak ikut serta menyampaikan pendapat dan aspirasi ketika keputusan tersebut dibuat (RamlanSurbakti, 2007:142)

Partisipasi memiliki jenis yang beragam tergantung negara tempat seseorang tinggal yang dan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negaranya. Dalam negara-negara modern, bentuk partisipasi yang paling sering digunakan adalah partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional. Kedua jenis partisipasi ini dianggap normal, kecuali apabila partisipasi tersebut menimbulkan kekerasan yang menyebabkan seseorang atau kelompok mengalami cacat fisik dan kehilangan harta. Adapun jenis partisipasi yang sebagian besar dipakai di negara-negara di dunia adalah partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif, adalah ketika seseorang mengikuti secara langsung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Sementara, partisipasi pasif adalah partisipasi yang dilakukan seseorang tanpa langsung ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun ia mematuhi dan menjalankan keputusan yang telah dibuat. Contohnya seperti membayar pajak (Tarech Rasyid, 2017:97).

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan lapangan dan dengan kepustakaan. Artinya penelitian ini adalah penelitian yang memberikan gambaran serta deskripsi berdasarkan hasil analisis yang berdasarkan pada kenyataan dan realitas yang ada di lapangan.

### **2. Data dan Jenis Data**

Dalam setiap penelitian terdapat 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data-data utama dalam penelitian. Data ini didapat dari penelitian langsung, baik melalui wawancara maupun observasi. Adapun dalam penelitian

ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa sebagai informan dari kampus-kampus yang dijadikan tempat penelitian.

Sedangkan, data sekunder merupakan data-data pendukung yang didapatkan untuk memperkuat hasil penelitian, seperti data dari buku, jurnal, internet. Selain itu data sekunder juga dapat berupa gambar, foto, maupun simbol yang ditemui pada saat melakukan penelitian (Nanang Martono, 2016 : 66).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara umum diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu data yang dikumpulkan secara interaktif dan data yang dikumpulkan secara non-interaktif (Sutopo, 2002:50). Dalam penelitian ini, tahap-tahap yang akan dilakukan peneliti ada 3 tahap yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Adapun dalam penelitian ini diadakan observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang dalam hal ini adalah mahasiswa di Kota Palembang (Nanang Martono, 2016:239). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi. berupa pengamatan terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa terhadap Isu-isu Politik Kontemporer.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mencari tahu informasi yang dibutuhkan secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian kepada informan (Juliansyah Noor, 2017 : 138). Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Badan Eksekutif

Mahasiswa, di Beberapa kampus yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

c. Dokumentasi

Proses dokumentasi ini dilakukan dengan pengambilan gambar bukti wawancara dengan informan sesuai dengan kebutuhan analisis (Nanang Martono, 2016 : 80). Lokasi dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian di lakukan. Penelitian ini dilakukan pada beberapa kampus-kampus di Provinsi Sumatera Selatan yaitu kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, kampus Universitas Sriwijaya, kampus Muhammadiyah Palembang dan kampus PGRI kota Palembang.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian di lakukan. Penelitian ini dilakukan pada beberapa kampus-kampus di Provinsi Sumatera Selatan yaitu kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, kampus Universitas Sriwijaya, kampus Muhammadiyah Palembang dan kampus PGRI kota Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Teknis analisis data merupakan cara peneliti atau langkah-langkah yang akan dilakukan selama proses penelitian. Langkah-langkah ini harus tersusun secara sistematis supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Selain itu, teknis analisis data juga diartikan sebagai proses pada saat mencari informasi hingga penarikan kesimpulan yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebuah penelitian haruslah memiliki



langkah-langkah yang tersistematis dan sesuai rencana supaya penelitian dapat berjalan lancar (Sugiyono, 2017: 244).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hal itu, maka dalam penelitian ini peneliti akan mengambil 3 langkah dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian-bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

Pada penelitian ini adalah mengkondensasikan data dengan meringkas data, dengan meringkas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dapat peneliti kaitkan dengan satu dan yang lainnya sehingga lebih paham saat menganalisis data. (Miles, Huberman dan Saldana 2014:31-33).

Penyajian Data Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk naratif. Artinya data berisi teks dan penjabaran-penjabaran tentang penelitian dan hasil wawancara. Selain itu, data juga disajikan dalam bentuk bagan yang berisi informasi yang telah diolah sebelumnya agar mudah dipahami oleh pembaca (Sugiyono, 2017: 249).

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam setiap penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan apabila tahap

pencarian informasi telah selesai. Kesimpulan dibagi menjadi dua jenis yaitu kesimpulan awal dan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sementara kesimpulan yang bersifat kredibel adalah apabila kesimpulan awal didukung dengan bukti dan dokumentasi yang valid maka kesimpulan tersebut dapat dibuktikan menjadi kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017 : 252)

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN**

Pada bagian bab ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topic yang dibahas. Bab ini harus dibedakan dengan KerangkaTeori di Bab I. Bab II lebih fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang focus masalah yang diangkat.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai lokasi dari objek yang diteliti. Lokasi ini di beberapa kampus-kampus provinsi Sumatera Selatan.

### **BAB IV HASIL & PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil temuan serta menganalisisnya menggunakan teori Partisipasi politik.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.



## BAB II

### PARTISIPASI POLITIK

#### A. Konsep Partisipasi Politik

Konsep partisipasi politik dalam suatu negara adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik yang diadakannya. Partisipasi yang dilakukan warga negara mampu mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pimpinan negara saja. Lebih lanjut (Budiardjo, 2007) mendefinisikan bahwa :

Partisipasi politik sebagai keikutsertaan kegiatan secara aktif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok orang, dengan melalui jalan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah atau *public policy*. Adapun kegiatan warga negara saat berpartisipasi politik diantaranya dengan memberikan hak suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, hadir dalam rapat umum, menjalin hubungan (*contacting*) dengan pejabat dalam pemerintahan legislative atau eksekutif.

Pada sisi lain Conway menjelaskan mengenai terminology partisipasi politik bermakna dalam mempengaruhi serta memilih struktur otoritas dan kebijakan pemerintah merupakan upaya yang dilakukan oleh warga negara. Dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh warga negara. (Widjanarko, 2004)

Dalam partisipasi politik, aspek yang perlu diperhatikan bukan hanya sikap, tetapi juga kegiatan yang memiliki sifat empiris. Selain itu, partisipasi politik juga merupakan kegiatan masyarakat sipil, artinya orang yang melakukan partisipasi politik adalah orang-orang yang berada di luar ruang lingkup pemerintah. Pejabat-pejabat pemerintah, pemimpin, anggota legislatif, dan sebagainya bukanlah termasuk sebagai orang melakukan partisipasi politik. Partisipasi politik juga bersifat relatif, artinya ia tidak mementingkan hasil akhir apakah ia berhasil atau tidak mempengaruhi kebijakan publik. Melainkan keikutsertaan atau keterlibatan saja yang dipentingkan. Menurut Herbert McClosky, yang disebut sebagai partisipasi politik adalah warga negara yang melakukan dan ikut serta mengambil bagian dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, secara langsung maupun tidak langsung, dan dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Budiardjo, 2007). Sementaraitu Dalton memberikan pendapat terdapat keterkaitan antara partisipasi politik dengan karakteristik personal yang mempengaruhi kelompok dan sikap politik.

Berdasarkan pengertian diatas, maka menyimpulkan bahwa penelitian ini akan dilakukan berfokus pada partisipasi politik mahasiswa dan yang menjadi informan adalah mahasiswa itu sendiri. Kesimpulan berikutnya yang disimpulkan oleh peneliti bahwa mahasiswa memiliki peran aktif dalam partisipasi politik secara sukarela baik individu maupun kelompok secara langsung maupun tidak yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kegiatan yang dimaksud tersebut seperti memberikan hak suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam kampanye politik, masuk dan menjadi anggota partai maupun kelompok kepentingan, menjalin hubungan (*contacting*) dengan pemangku kebijakan serta kritik

terhadap kebijakannya. Selanjutnya terkait definisi tersebutlah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

## **B. Bentuk Partisipasi Politik**

Terdapat dua jenis bentuk partisipasi politik yang diklarifikasi oleh Conway, yakni bentuk konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi politik yang konvensional lebih mengarah kepada dominasi politik yang sesuai dengan budaya politik. Sedangkan partisipasi politik non-konvensional mengarah kepada dominasi budaya politik yang aktivitasnya tidak diterima didalamnya. Huntington dan Nelson memiliki perbedaan pendapat dengan Conway, yang menjelaskan beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik dalam kategori sebagai berikut : (Widjanarko, 2004)

1. *Electoral Activity*. Artinya partisipasi politik yang dilakukan melalui cara ini adalah partisipasi dalam pemilihan umum, yaitu memberikan suara untuk memilih pejabat pemerintahan dan wakil rakyat. Selain itu, kegiatan ikut serta secara tidak langsung dalam pemilihan umum juga termasuk *Electoral Activity*, seperti membantu proses perhitungan hasil suara, maupun ikut kampanya partai.
2. *Lobbying*. Artinya tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang pemerintahan dengan cara negosiasi baik langsung maupun tidak langsung.
3. *Organization activity*, artinya kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat dalam organisasi sosial maupun politik.
4. *Contacting*, yaitu warga negara yang berpartisipasi dengan cara seperti membangun komunikasi dalam rangka membangun jaringan kerjasama.

5. *Violence*, yaitu proses mempengaruhi pemerintah melalui cara-cara kekerasan. Metode kekerasan digunakan memiliki cerminan motivasi partisipasi yang cukup kuat. Kekerasan ditujukan untuk memberi pengaruh dalam kebijakan-kebijakan pemerintah berupa huru-hara, pemberontakan atau dengan cara revolusi yang mengubah seluruh sistem politik pada negara tertentu.

Verba et al sementara itu mengemukakan bahwa bentuk partisipasi yang dipilih individu-individu dilakukan sesuai dengan motivasi dan tujuan secara tetap yang tidak berubah-ubah seperti yang banyak analis asumsikan, bentuk-bentuk partisipasi sejenis membentuk kelompok bersama. Dalton (2009) kemudian memodifikasi pengelompokan tersebut sebagai berikut :

- a. *Voting*. Kegiatan ini masih berkaitan dengan pemilihan. Namun *voting* merupakan jenis cara pemilihan yang paling sederhana, yaitu dilakukan secara otodidak saat bingung untuk menentukan keputusan.
- b. *Campaign activity*. Aktivitas ini merupakan keterlibatan dalam kegiatan kampanye yang dilakukan pada saat akan diadakan pemilihan umum. Segala aktivitas kampanye, seperti mempersuasi masyarakat, mengiklankan pasangan calon, maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kampanye.
- c. *Communal activity*. Merupakan kumpulan orang-orang yang peduli dengan aktivitas komunal. Termasuk di dalamnya orang-orang yang berfokus pada studi lingkungan, perlindungan konsumen, maupun kelompok wanita. Mereka berada di luar kegiatan pemilihan.



- d. *Contacting personal on personal matters*, yaitu individu yang berkontak langsung dengan individu yang merupakan bagian dari pemateri pemerintahan. Adapun kontak ini dilakukan secara perseorangan, memerlukan inisiatif dan informasi yang baik terkait spesifikasi terkait isu tertentu. Partisipasi jenis ini biasanya dipakai untuk membangun hubungan yang lebih dekat demi kepercayaan, pengertian, memperluas jaringan.
- e. *Protest*. Merupakan partisipasi politik yang terwujud sebagai demonstrasi atau tanda ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan akan terjadinya demonstrasi.

Partisipasi mahasiswa terhadap isu-isu dari era ke era tentunya berbeda-beda, mulai dari era presiden Soeharto di tahun 1998 yakni pendudukan kekuasaan selama 32 tahun dan dibungkamnya demokrasi membuat seluruh rakyat Indonesia muak, tak terlepas dengan mahasiswa, penjarahan, perusakan pun serentak dilakukan tanpa aba-aba semua itu terjadi ditambah lagi dengan inflasi sehingga menyebabkan krisis moneter yang dialami oleh Indonesia. Di era reformasi 1999 yang digantikan oleh BJ Habibie semua mulai pulih, mulai dari isu kedaerahan, nilai rupiah yang kembali membaik, pembebasan tahanan politik, serta kebebasan pers. Namun kasus pembebasan Timor-timor yang dilakukan oleh BJ Habibie juga menimbulkan banyak konflik sehingga reputasi Habibie pun rusak parah dan dianggap tak bertanggungjawab.

Di masa kepemimpinan Abdurahman Wahid 1999-2001 kasus korupsi masih marak terjadi hingga ia pun dimakzulkan karena penggunaan dana Negara yang ketidakjelasannya dipertanyakan. Di

masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri (2001-2004) mahasiswa melakukan aksi berupa penolakan karena, Megawati dinilai tidak mampu dan gagal dalam memimpin bangsa dan menjalankan agenda reformasi terkait 3 kegagalannya yaitu: penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, dan masalah pendidikan, serta korupsi yang semakin meningkat dan tak menunjukkan hasil yang memuaskan melalui lansiran tempo.co.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2014) selama 2 periode memimpin, presiden yang kerap disapa SBY pernah didemo oleh mahasiswa maupun masyarakat terkait isu kinerja yang ia tanggung seperti korupsi dan kasus bank Century, serta kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dan di masa pemerintahan Joko Widodo (2015-2024) demonstrasi dilakukan terkait pandemi, omnibus law, ruu kpk, dan serangkaian kinerja yang kurang optimal dilakukan, serta terdapat UU seperti UU ITE yang sebelumnya berfungsi untuk memfilterisasi hal-hal yang sifatnya HOAX, namun masyarakat seolah-olah takut untuk bersuara.

Melalui berbagai aksi yang dilakukan tentunya, setiap masa kepemimpinan ada kelebihan dan kekurangan, sebagai wujud evaluasi dan mahasiswa merupakan kelompok yang sifatnya netral dan tak mampu dipengaruhi dan kualitas mahasiswa dari era ke era tentunya berbeda sesuai dengan kepekaan isu yang dihadapi dan seberapa peduli mereka terhadap isu politik yang marak terjadi.

Sesuai dengan Widjanarko, ia menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam berpartisipasi politik, dan dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh warga Negara, termasuk mahasiswa.

### **C.Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya partisipasi politik adalah sosialisasi politik. Berdasarkan pengertian dari Rush dan Althoff (Budiardjo, 2008), suatu cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, observasi atau pengamatan politik, serta sikap ataupun nilai terkait suatu masyarakat, itulah yang disebut sebagai sosialisasi politik. Dalam membentuk tindakan individu pengetahuan sangat penting diperoleh oleh individu.

Disugestikan oleh Rush dan Althohh (Budiardjo, 2007) bahwa partisipasi politik memiliki variasi terkait dengan empat faktor utama, yaitu :

1. Bagaimana perangsang politik dapat diterima oleh masyarakat;
2. Seperti apa watak dan sifat masyarakat;
3. Bagaimana cara masyarakat bersikap sebagai individu sosial;
4. Bagaimana seseorang menemukan jati dirinya dalam suatu keadaan politik tertentu.

Weiner sejalan dengan hal tersebut (Budiardjo,2007) terdapat beberapa faktor partisipasi yang dikemukakannya, yakni:

1. Proses Modernisasi
2. Strata sosisl perlahan mengalami perubahan-perubahan yang tidak terstruktur.
3. Peningkatan penggunaan komunikasi massa dan kaum intelektual yang berpengaruh.
4. Terjadinya konflik antara para pejabat politik.
5. Aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya didominasi oleh pengaruh keterlibatan pejabat pemerintah.

Menurut dari pendapat para ahli, dapat tersirat bahwa partisipasi politik secara individu memiliki dua faktor yang mempengaruhinya, yakni dari dalam diri dan dari luar diri individu. Pengetahuan setiap individu dan karakter pribadi individu serta sikapnya terkait rangsangan politik mempengaruhi faktor dalam diri, sedangkan faktor luar diri banyak dipengaruhi oleh kondisi politik, modernisasi, karakteristik sosial, pengaruh kaum intelek, perubahan struktur sosial, dan terjadi peningkatan komunikasi massa sampai meluasnya keterlibatan pemerintah dalam urusan ekonomi, sosial, dan budaya.

#### **D.Fungsi dan Tujuan Partisipasi Politik**

Berdasarkan pernyataan Budiardjo (2008) bahwa partisipasi politik memiliki tujuan untuk memberi pengaruh dalam proses politik yang menentukan pengambilan kebijakan dari pemerintah. Agar kebijakan dari pemerintah lebih berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat, perlu partisipasi politik yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Diharapkan melalui partisipasi politik tersebut dapat membangun system politik yang stabil dan terciptanya kehidupan bernegara yang baik.

Dalam studinya Robert Lane (Rush dan Althoff, 2008) terkait keterlibatan politik, partisipasi politik memenuhi empat fungsi, yaitu :

1. partisipasi politik untuk masyarakat yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mereka.
2. Selain itu, organisasi di masyarakat juga berfungsi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan dalam partisipasi politik. Seperti mengajukan aspirasi untuk kebijakan pemerintah,

3. *Control* terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakannya  
Melihat pendapat yang dikemukakan diatas, memberikan kesimpulan terkait fungsi partisipasi politik sebagai media dalam menyuarakan aspirasi dari masyarakat dalam memberikan arah dan mengontrol kebijakan pemerintah agar terarah ke pembangunan negara yang lebih berpusat pada aspirasi dan kepentingan masyarakat demi terwujudnya kehidupan politik negara yang dinamis dan kuat dalam mengembangkan system politik terkait mekanisme politik berjalan sesuai dengan prosesnya.

Menurut pendapat dari Rahman H.I pada tahun 2007, orientasi secara umum diumum yang dibedakan berdasarkan orientasi ada dua jenis yaitu, partisipasi yang berorientasi pada proses input dan partisipasi yang berorientasi pada proses output. Dalam pengelompokkannya partisipasi input dapat digolongkan sebagai partisipasi aktif. Sedangkan partisipasi pasif adalah partisipasi yang berproses output. Output yang dimaksud berupa pengaruh dan ketaatan terhadap pemerintah, dan sebagainya.

### **E. Isu Kontemporer**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasinya berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, dan sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat.

Sedangkan kontemporer adalah kekinian, atau sesuatu yang menggambarkan hal-hal yang terjadi pada saat yang sama atau masa

sekarang . dalam KBBI, kontemporer adalah hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi saat ini.

Dapat disimpulkan bahwa, isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang diperbincangkan, dihindari, solusi dan kebutuhan, berdasarkan keadaan yang semakin serba modern yang terjadi pada lingkungan sekitar maupun mencakup dunia global yang terjadi pada saat ini.

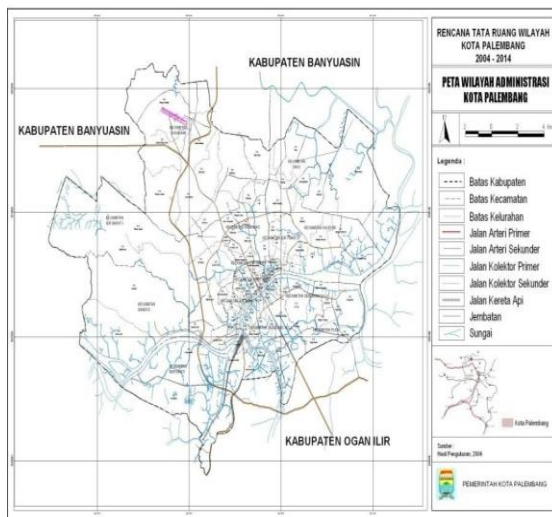
## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan keadaan umum tentang wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang dengan lokasi penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Terhadap Isu-Isu Kontemporer (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Palembang).

#### A. Kota Palembang

##### a. Letak Geografis



Gambar Peta 3.1

Kota Palembang terletak antara  $2^{\circ}52'$  sampai  $3^{\circ}05'$  Lintang Selatan dan  $104^{\circ}37'$  sampai  $104^{\circ}52'$  Bujur Timur. Sebagai kota yang terus berkembang, Kota Palembang terus mengalami perubahan. Perubahan yang tampak adalah jumlah kecamatan dalam beberapa kurun waktu terakhir, yaitu 16 Kecamatan dan 107 kelurahan pada tahun 2007. Kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 18 Kecamatan dan 107 kelurahan. Hal ini di atur dalam SK Nomor 136/4123/BAK.

Secara geografis Palembang memiliki luas sebesar 40,061 ha (dijelaskan dalam PP Nomor 23 tahun 1988). Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Gandus, yaitu sekitar 17,17% dari luas seluruh kota (68,78 km<sup>2</sup>) dan Sementara wilayah dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Ilir Barat II, yaitu sekitar 1,55% dari luas keseluruhan (6,22 km<sup>2</sup>). Wilayah Kota Palembang

bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir. (BPS, 2020).

Pada gambar 2.2 peta wilayah Kota Palembang menjelaskan bahwa Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu batas utara ke Kabupaten Banyuasin, batas selatan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, batas timur ke Kabupaten Banyuasin, dan batas barat ke Kabupaten Banyuasin juga yang terbagi 16 Kecamatan dan 107 kelurahan di Kota Palembang dengan luas sebesar 400,61 km.

## **b. Iklim**

Ketinggian suatu wilayah sangat berpengaruh bagi iklim di tempat tersebut. Iklim merupakan cuaca jangka panjang suatu tempat. Selain itu, jarak dengan garis pantai juga sangat mempengaruhi suhu yang ada di tempat tersebut. Pada tahun 2019, suhu udara maksimum terjadi pada bulan November yang berkisar 37,400C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan September yang berkisar 22,000C. berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa suhu di Kota Palembang adalah tidak tetap.



Selain suhu, suatu tempat juga memiliki kecepatan angin. Di Kota Palembang kecepatan angin bulanan berkisar antara 3,14 Knot hingga 4,89 knot. Dalam kecepatan angin, dipengaruhi oleh tekanan udara di wilayah tersebut.

Karena adanya suhu dan kecepatan angin, hal ini sangat mempengaruhi curah hujan di suatu tempat. Karena suhu dan kecepatan angin merupakan satuan yang tidak tetap Curah hujan pertahun 2019 berkisar antara 0,50 mm (Agustus) sampai 484,60 mm (Maret). Palembang mempunyai kelembaban udara relative tinggi dimana pada tahun 2019 rata-rata berkisar antara 77,56% (Oktober) sampai 91,38% (Februari). (Badan Pusat Statistik, 2020)

### **c. Kependudukan**

Jumlah penduduk di kota Palembang makin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan tingkat kelahiran lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian. Berdasarkan data BPS tahun 2019, penduduk kota Palembang dikatakan meningkat sebesar 1,18% dibandingkan tahun 2018. Jumlah keseluruhan penduduk adalah 1.662.893 jiwa. Terdiri atas penduduk laki-laki yang berjumlah 834.175 jiwa, sementara penduduk perempuan sebesar 828.175 jiwa. Dari jumlah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan per tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Iilir Barat II	35.728	35.539	71.267	100.53
2	Gandus	32.095	31.925	64.020	100.53
3	Seberang Ulu I	46.143	45.476	91.619	101.47
4	Kertapati	44.918	44.697	89.597	100.53
5	Jakabaring	45 304	45 487	90.791	99.60
6	Seberang Ulu II	52.243	51.966	104.209	100.53
7	Plaju	44.250	44.015	88.265	100.53
8	Iilir Barat I	69.115	68.748	137.863	100.53
9	Bukit Kecil	24.502	24.372	48.874	100.53
10	Iilir Timur I	38.654	38.448	77.102	100.54

11	Kemuning	45.831	45.588	91.419	100.53
12	Iilir Timur II	46.539	46.813	93.352	99.41
13	Kalidoni	55.663	55.367	111.030	100.53
14	Iilir Timur III	42.193	41.447	83.640	101.80
15	Sako	45.999	45.755	91.754	100.53
16	Sematang Borang	17.958	17.863	35.821	100.53
17	Sukarami	78.002	77.588	155.590	100.53
18	Alang-Alang Lebar	48.572	48.314	96.886	100.53
Palembang		813.709	809.390	1.623.099	100.53
2015		791.943	788.574	1.580.517	100.43
2016		802.990	799.081	1.602.071	100.49

**Tabel 3.1Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Palembang**

**Sumber: BPS Kota Palembang**

Berdasarkan tabel 2.2 diatas yang menjelaskan bahwasanya jumlah yang paling banyak penduduknya di wilayah Kecamatan Sukarami baik laki-laki sebesar 78.002 dan perempuan nya 77.588 dan tingkat yang paling rendah wilayah Sematang Borang, laki-laki sebesar 17.958 dan perempuan 17.863.

#### **d. Ketenagakerjaan**

Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 759.115 orang. 92,06% diantaranya merupakan penduduk yang bekerja penuh. Sementara berdasarkan data tahun 2019, jumlah pengangguran di kota Palembang mencapai 7,94%. Angka pengangguran yang mencapai 7,94% tersebut adalah jumlah angka yang terdiri dari pengangguran terselubung dan pengangguran terbuka. Selain itu pengangguran yang dimaksud adalah pengangguran yang sedang mencari kerja dan yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Palembang, jumlah pengangguran terdiri atas 43,31% adalah tingkat pendidikan setara SMA, dan untuk jumlah sarjana dan tingkatan perguruan tinggi adalah 21,69% (Badan Pusat Statistik, 2020).

#### **e. Pendidikan**

Tingkat pendidikan di kota Palembang cukup memadai dan sangat diperhatikan. Hal ini dapat

ditunjukkan melalui gedung-gedung sekolah dan berbagai fasilitas pendidikan yang ada di kota Palembang baik negeri maupun swasta. Adapun jumlah keseluruhan gedung sekolah di kota Palembang adalah 874 gedung, mulai dari gedung sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Adapun jumlah sekolah tingkat dasar adalah 438 (termasuk Madrasah Ibtidaiyah), sekolah menengah tingkat pertama (termasuk Madrasah Tsanawiyah) berjumlah 218, Sekolah Menengah atas (termasuk Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah) sebanyak 218 sekolah.

Selama tahun ajaran 2019/2020, jumlah murid SD sebanyak 143.476 orang, SMP sebanyak 67.401 orang, dan murid SMA 48.886 orang. Jumlah guru yang mengajar di masing-masing sekolah pada tahun 2019/2020 ini terdiri atas 6.581 guru Sekolah Dasar, 3.891 orang guru SMP, serta 2.755 orang guru SMA.

( Badan Pusat Statistik, 2020)

#### **f. Kesehatan**

Fasilitas Kesehatan di kota Palembang juga termasuk yang terbaik. Hal ini juga dapat dilihat melalui gedung-gedung rumah sakit, puskesmas pusat dan puskesmas pembantu, serta berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Pada tahun 2019, ada 33 buah rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit umum, khusus dan bersalin. Fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas berjumlah 41. Di

bidang Keluarga Berencana pada tahun 2019 ini jumlah peserta KB aktif sebesar 231.594 dimana sebagian besar peserta KB aktif menggunakan metode kontrasepsi suntikan yang mencapai 34,73 persen atau sebesar 80.432 orang. (Badan Pusat Statistik,2020)

#### **g. Agama dan Sosial Lainnya**

Berdasarkan data tahun 2019 sebagian besar penduduk kota Palembang menganut agama Islam yaitu berkisar sekitar 92,79%. Dan jumlah sisanya adalah penduduk yang menganut agama Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu.Karena mayoritas penduduk kota Palembang adalah beragama Islam, oleh karena itu bangunan masjid mendominasi rumah ibadah di Palembang. Jumlah masjid beserta musholla yang ada di Kota Palembang berkisar 1.672 unit(Badan Pusat Statistik,2020).

#### **h. Kemiskinan**

Kemiskinan tampaknya merupakan kasus ekonomi yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara. Sama halnya di Palembang, kasus kemiskinan makin meingkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 206,49 ribu jiwa, berkisar sekitar 13,59%. Jumlah kasus kemiskinan sempat menurun cukup drastis di tahun 2019 menurun hingga 180,67 ribu orang atau menurun sekitar 10,90%. Hingga tahun 2020 kasus kemiskinan di kota Palembang mengalami naik turun dan

sifatnya tidak tetap karena kota Palembang masih terus membenahi diri untuk menjadi semakin baik ke depannya (Badan Pusat Statistik, 2020).

## **B. Universitas di Sumatera Selatan**

### **1. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**



Gambar 3.2 Logo UIN RF

Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada awal didirikan merupakan sebuah Institut yang seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan dan kemajuan. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah atau yang sering disebut IAIN Palembang merupakan perguruan berbasis Islam yang didirikan pada tahun 1964 tepat pada tanggal 13 November di Gedung DPR Sumatera Selatan. IAIN Raden Fatah Palembang didirikan berdasarkan SK Menteri Agama No.7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Alasan pendirian IAIN Raden Fatah adalah berdasarkan hasil Mukhtamar Ulama se Indonesia yang diadakan pada tahun 1957 di kota Palembang. Berdasarkan

hasil muktamar tersebut, maka dibangunlah 3 institut berbasis Islam, yaitu IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, dan IAIN Raden Fatah di Palembang.

Awalnya hasil muktamar tersebut hanyalah sebuah gagasan, namun ternyata gagasan tersebut disambut baik oleh pemerintah dan seluruh peserta muktamar. Setelah gagasan tersebut disetujui, kemudian diresmikanlah Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H.A. Ghani Sindang Muchtar Effendi pada tanggal 11 September 1957, yaitu hari terakhir diadakannya muktamar.

Selanjutnya setelah itu dibentuk yayasan Perguruan Tinggi Sumsel yang diisi oleh pejabat-pejabat pemerintah, ulama, serta tokohmasyarakat. Setelah cukup lama didirikan dan mengalami proses yang panjang, akhirnya IAIN meningkat menjadi universitas berdasarkan Perpres No.129 Tahun 2014, dan berubah sebutan dari IAIN menjadi UIN.

Prestasi yang telah didapatkan ini tentunya harus menunjukkan perubahan menjadi semakin baik, dengan membenahi berbagai program dan merubah berbagai sistem untuk semakin maju.



## 2. Universitas Sriwijaya



Gambar 3.3 Logo Universitas Sriwijaya

Keinginan Sumatera Selatan untuk memiliki sebuah universitas terwujud pada tahun ke-7 setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1952 sekaligus dicetuskan sebagai hari kelahiran Universitas Sriwijaya. Fakultas yang pertama kali dibentuk setelah Universitas Sriwijaya diresmikan adalah Fakultas Ekonomi (FE). Pembentukan Fakultas Ekonomi ini diprakarsai beberapa orang pemuka masyarakat di kota Palembang, dan akhirnya diresmikan pada tanggal 1 April 1953. Selanjutnya setelah mengalami berbagai proses dan berkembang, UNSRI kembali membentuk fakultas baru sebagai upaya untuk memperbanyak fakultas di UNSRI. Fakultas ke-2 yang akan didirikan setelah Fakultas Ekonomi adalah Fakultas

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada tahun 1957, tepatnya tanggal 1 November.

Dalam perkembangannya UNSRI mengalami berbagai tantangan. Dan untuk memenuhi tuntutan perubahan universitasnya, UNSRI membuat rencana untuk memperluas universitasnya, yaitu membangun gedung penambahan kampus diatas tanah seluas 712 ha di daerah Indralaya. Kampus UNSRI di Indralaya diresmikan pada tanggal 1 September 1993 oleh Gubernur Sumsel H. Ramli Hasan Basri, sekaligus menyampaikan kulaih perdananya sebagai penanda dibukanya kampus baru di Indralaya (Quipper.com).

### 3. Universitas Muhammadiyah Palembang



Gambar 3.4 Logo Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam mendirikan Universitas Muhammadiyah ide tersebut dicetuskan pada tahun 1963 oleh tokoh-tokoh muda Muhammadiyah seperti Drs. M. Djakfar Murod, Drs.

Al Hady Haq, Drs. Sanusi Has, Drs. Fakhri Bastari dan Drs. Idris Halim. Melalui gagasan kelompok muda ini para tokoh Muhammadiyah dan PWM Sumatera Selatan menyambut baik hal tersebut, adapun PWM Sumatera Selatan tersebut yaitu K.M. Sidik Adim, Djamain Sutan Marajo, K.H. Mansur Azhari, Datuk RusliZamhari Abidin, SH, M. Yunus yang dikenal sebagai perintisnya. Usaha tersebut namun belum dapat terwujud karena adanya UU No. 22 tahun 1961 tentang persyaratan mendirikan perguruan tinggi swasta minimal harus memiliki 4 Fakultas dan 2 Fakultas diantaranya eksakta.

Fakultas Hukum dan Filsafat Muhammadiyah pada tahun 1963 merupakan cikal bakal dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Pertama kali, perkuliahan di UMP, dilakukan di Masjid Muhammadiyah di daerah Bukit Kecil, Palembang. Setelah cukup lama, kemudian Fakultas Hukum dan Filsafat Muhammadiyah berganti menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan (FHIK) pada tahun 1965. Setelah semakin berkembang, FHIK berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah., tepatnya tanggal 28 Januari 1967.

#### 4. Universitas PGRI Palembang



Gambar 3.5 Logo PGRI Palembang

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) merupakan awal dari pengembangan Universitas PGRI yang mendapat izin dari SK Mendiknas No.97/D/O/2000 tanggal 9 Juni 2000 lahirnya 5 Fakultas dan 1 Pasca sarjana diantaranya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan dan Program Pascasarjana. (<https://univpgri-palembang.ac.id/sejarah-universitas/>)

Dari ke empat universitas tersebut mulai dari UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Sriwijaya, dan Universitas PGRI Palembang memiliki alasan tertentu untuk dijadikan objek atau lokasi penelitian, diantaranya:

1. Ke empat universitas tersebut merupakan representasi universitas terbesar di Sumatra Selatan, khususnya Kota Palembang.
2. Universitas tersebut tergabung dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Selatan.
3. Universitas tersebut memiliki Ketua BEM di fakultas maupun universitasnya.
4. Merupakan universitas yang sering terlibat dalam partisipasi politik yakni dengan aksi turun ke jalan dan menjadi pelopor atau penyuar terkait isu-isu yang menyangkut Sumatra Selatan ataupun skala nasional.
5. Setiap universitas memiliki peran penting khususnya BEM universitas untuk mengajak massa bersuara dan peka terhadap isu-isu kontemporer.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Partisipasi Politik Mahasiswa terhadap Isu-isu Kontemporer.**

Di Provinsi Sumatra Selatan, khususnya Kota Palembang ditinjau melalui keterlibatannya, mahasiswa melakukan partisipasi politik secara aktif yakni turun ke jalan dan melakukan aksi terkait pertentangan kebijakan/menolak regulasi dari pemerintah.

Melalui lansiran dari detik sumsel di tahun 2019, aksi protes mahasiswa terjadi terhadap RKUHP terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa. Undangan dan ajakan aksi telah tersebar di media sosial dan grup-grup WhatsApp sejak tadi malam. Undangan itu mengajak semua mahasiswa libur kuliah dan turun ke jalan. Seruan aksi Sumsel Bergerak, kuliah 4 SKS di gedung DPRD Sumsel," demikian ajakan aksi yang tersebar luas di media sosial.

Selain mahasiswa UIN Raden Fatah, aksi ini akan diikuti mahasiswa lain, seperti dari Politeknik Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan kampus lain di Palembang. Tapi sejauh ini belum diketahui apakah mahasiswa Universitas Sriwijaya juga akan turun beraksi. Hal tersebut merupakan tuntutan yang dilakukan berdasarkan konsolidasi yang digelar pada malam hari untuk sama-sama turun ke jalan untuk menolak

RKUHP yang dinilai ngawur. Selang setahun kemudian tepatnya, tahun 2020 mahasiswa di Sumsel kembali turn ke jalan terkait kontra Undang-undang Omnibus Law.

Dilansir dari Pikiran Rakyat, sejak disahkannya UU tersebut, berbagai gejolak penolakan terus dilakukan masyarakat Indonesia baik melalui media sosial (Medsos) maupun aksi demo di berbagai daerah. Mahasiswa di Sumsel sendiri telah melakukan aksi demo selama tiga hari secara berturut-turut yang dilakukan di Gedung DPRD Sumsel dan Kantor Gubernur Sumsel.

Pelaksanaan aksi yang diikuti ribuan mahasiswa di Sumsel ini, sempat terjadi kerusuhan antara pihak kepolisian dengan mahasiswa yang terjadi pada pelaksanaan demo hari kedua di Gedung DPRD Sumsel. Dilansir melalui Liputan 6, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumatera Selatan sama-sama turun ke jalan serta membuka mimbar bebas menolak sejumlah rancangan undang-undang atau RUU yang dinilai akan mengancam demokrasi dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu lingkungan.

Aksi tersebut merupakan bagian dari seruan Aliansi BEM Indonesia yang diselenggarakan serentak di beberapa daerah yang diselenggarakan pada 23-24 September. Selain itu, salah satu motif mahasiswa maupun buruh melakukan aksi yakni adalah pokok pangkal persoalan dari demo yang terjadi sejak 6 Oktober hingga hari ini, Kamis, 8 Oktober 2020 adalah pengesahan



Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan pada 5 Oktober lalu. Bila merujuk pada draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal-pasal bermasalah, yang mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, pers hingga lingkungan hidup.

Dalam hal ketenagakerjaan, menurut Amnesty Internasional, RUU Ciptaker berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja. Berdasarkan teori partisipasi politik dalam *International of The Social Science* yang dianut oleh Resenstone dan Hansen. Dimana partisipasi politik memiliki focus terhadap ekspresi politik dari individu atau kelompok masyarakat secara aktif ikut serta dalam pemilihan pemimpin ataupun pada upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Selain itu, mahasiswa di Palembang dalam memilih pemimpin mendapat tingkat partisipasi yang tinggi lewat sebuah ekspresi politiknya. Dalam *International Ensiklopedia of The Social Science* menyatakan bahwa partisipasi politik memiliki acuan terhadap kegiatan dari publik massa dalam berpolitik, kampanye politik, pemungutan suara, menghubungi pejabat, memberi uang pada kandidat, boikot peragaan serta bekerja dengan orang lain dalam masal.

Dalam partisipasi politik secara aktif mahasiswa harus meyakini posisi mereka tak mampu ditunggangi mencangkup keyakinan dan bukan sikap atau bentuk tindakan politik, bukan

pejabat, calon politik, lobby, professional yang berontak dalam hal itu, untuk mempengaruhi pemerintah, membujuk, menekan pejabat pemerintah, untuk mengubah keputusan. dan sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang berpartisipasi dalam berpolitik secara aktif berdasarkan Teori Resenston dan Hansen yakni keterlibatan gabungan dari anggapan bahwa orang lebih cenderung berpartisipasi di saat mereka diminta untuk melakukannya.

Hal ini terkait dengan isu yang diangkat, karena tak sedikit mahasiswa yang hanya ikut-ikutan dalam suatu gerombolan aksi dan demonstrasi hanya untuk bisa dikatakan satu suara, berpihak pada rakyat, penyambung lidah dan aspirasi masyarakat, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, isukontemporersepertiapa yang harus dibahas, adakah yang harusdibenahi, direvisi, bukan hanya mendengarkan komando untuk langsung terjun ke jalan.

Berdasarkan observasi dari 4 Universitas di Kota Palembang yakni Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya, Universitas PGRI Palembang, dan Universitas Muhammadiyah Palembang. Terdapat perbedaan mendasar mengenai konsep dari isu demonstrasi atau pun aksi di era tempo dulu tepatnya masa orde dengan kontemporer. Dari KetuaSenat UIN Raden Fatah Palembang menjelaskan bahwa perbedaan antara pergerakan mahasiswa sebelum dan sesudah pasca reformasi sebemarnya relative samaakan tetapi polanya saja yang berbeda.

*“Akhir-akhir ini(2019) melakukan aksi UU Omnibus Law dan RUU KPK banyak memakan korban jiwa, aksi-aksi yang dilakukan banyak mengatasnamakan badan legislatif, berbeda ketika PraReformasi yang dimana banyak menggunakan organisasi dari luar seperti HMI, KAMI, GMI dan seperti itu. Karena pada zaman prareformasi belum ada yang namanya Dewan Eksekutif Mahasiswa mungkin itu saja yang membedakannya.*

*Di UIN Raden Fatah sendiri, isu-isu mengenai UKT tentu saja orang tua mahasiswa yang kurang mampu dan yang terkena PHK, peran kami adalah bagaimana membantu mahasiswa ini untuk mendapatkan bantuan atau keringanan UKT” ujarinya.*

*“Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa “kader-kader kami memahami isu, sebelum kami melakukan aksi kami mengadakan konsolidasi, di dalam konsolidasi itu kami menjelaskan mengenai isu-isu yang harus kita pahami dan bagaimana peran kita ketika melakukan aksi tersebut jadi seperti itu untuk mengetahui seberapa jauhnya.*

*Untuk peran dari anggota aksi dalam barisan tersebut ketika kordinator aksinya berteriak yel yel untuk menambah semangat ketika di dalam aksi maka anggota tersebut harus juga mengikuti instruksi dari*

*kordinatoraksinya, pengetahuan akan isu juga kami melakukan konsolidasi.*

*Untuk posisi di barisan juga kami atur posisinya dengan sebaik mungkin walaupun kami dikawal oleh pihak kepolisian agar aksi berjalan dengan tertib. Untuk sikap isu diabaikan, maka kami akan melakukan aksi berkali-kali sampai aspirasi kami didengarkan dan ditindaklanjuti” ucapnya menambahkan.*

*“Perbedaan pra dan pasca reformasi saat melakukan aksi demonstrasi adalah informasi terkait aksi, dan kenapa kita harus care dengan isu yang kita angkat, karena biasanya kalau perihal masalah internal kampus itu dihandle oleh universitas itu sendiri, lain hal menyajikan isunya umum seperti Omnibus Law dan RUU KPK , biasanya kita kaji bersama BEM se-Sumatra Selatan,” ujar Ketua BEM FKIP UNSRI.*

Ia juga menambahkan tingkatan aksi dan pendalaman isu saat melakukan aksi *“Saya ambil contoh aksi reformasi dikorupsi, pemahaman saya terkait isu tersebut saya paham kenapa isu tersebut kita angkat, karena salah satunya RUU KPK yang benar-benar menjadi delik,*

*alhasil kita bisa lihat sejak RUU itu diberlakukan kinerja KPK dirasakan menurun,”*

*”Selain itu, kalau untuk staff- staff sendiri insyaallah sudah diberi "wejangan" terkait kenapa sih kita haru saksi, dan untuk posisi dan peran saat aksi biasanya sebelum ke lapangan kita briefing dulu dengan masa aksi, kalau gerakan kita tidak ditanggap iya biasanya itu ada seruan 1 langkah perjuangan untuk menembus barikade. Nah disitu biasanya, orang-orang yang kita tuntutan itu menemui kita,”pungkasnya.*

Selain itu, Ketua BEM Fakultas Ekonomi PGRI pun juga ikut menanggapi bahwa, *”Setiap kali melakukan aksi biasanya isu-isu yang diangkat saat aksi adalah isu-isu yang kurang berkenan di masyarakat atau para mahasiswa, seperti Omnibus Law yang menganggap ada kebijakan yang tidak sesuai dengan situasi yang ada pada masyarakat,”*

*“Ditambah lagi, karena semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang, mungkin menjadikan pergerakan lebih mudah karena tidak hanya melakukan pergerakan secara langsung, pergerakan melalui media teknologi bisa dilakukan dan lebih banyak juga mendapat antusias dari*

*masyarakat (misalnya dengan penggunaan hastag di media sosial),” tuturnya.*

Dalam memahami isu yang datang, Ketua BEM Ekonomi PGRI menyampaikan bahwa *“Sebelum melakukan pergerakan ada baiknya kita mengetahui bahwa isu yang akan kita angkat dalam aksi tersebut benar, jangan hanya dengar dari orang yang belum tentu mengetahui fakta yang sebenarnya.*

*Kemudian untuk posisi biasanya kami akan berbagi peran, ada yang naik ke mobil komando, ada yang bertugas sebagai coordinator lapangan, kemudian kawan-kawan yang lain akan berada dalam barisan dan membentuk pola tertentu agar jika terjadi chaos maka mereka akan bisa dengan cepat menyelamatkan diri.*

*Jika pergerakan kita tidak didengarkan sebaiknya, kita jangan larut dalam suasana ada baiknya kitatany akan alasan kembali mengapa pergerakan kita tidak didengarkan, jika pergerakan kita memang tidak disetujui minta kejelasannya juga mengapa tidak setuju, Namun jika tidak ada kejelasan juga maka mendobrak pintu masuk adalah pilihan terakhir,” lanjutnya menambahkan.*

Ketua BEM PAI Muhammadiyah juga menyampaikan *“Bahwa di era kontemporer saat ini, sisi politik ini sangat terlihat pada saat mengangkat dan mengkaji isu. Isu-isu yang diangkat haruslah bersumber dari media terpercaya serta berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa batas informasi terkait isu tersebut datangnya jauh lebih cepat, namun harus tetap dicermati,”*ucapnya. *“Sebagai seorang mahasiswa harus peka terhadap isu-isu politik kontemporer, maupun polemic karena mengapa jika mahasiswa tidak mengawal kebijakan tersebut atau tidak mengawal isu-isu tersebut tentu para penguasa akan semakin leluasa untuk bertindak secara otoriter.*

*Sebagai contoh kasus Omnibus law yang jika disahkan mendapatkan dampak yang memberatkan masyarakat, tentu kita sebagai mahasiswa sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah menjalankan tupoksi kita menjadi front liner masyarakat dalam menampung aspirasi suaranya,”*pungkasnya.

Dari pernyataan isu yang diangkat, di setiap universitas memiliki isu-isu yang sifatnya internal maupun eksternal. Dari isu yang mengangkathajat orang banyak dan kepentingan umum, ihwal yang berdampak jangka panjang maka isu tersebut akan dikaji terlebih dahulu serta melibatkan seluruh keanggotaan

BEM di Sumatra Selatan. Namun berdasarkan isu internal yang diangkat mereka tidak ikut terlibat satu sama lain dalam proses secara langsung, namun dukungan moril selalu diupayakan sebagai bentuk solidaritas anatar anggota BEM Se- Sumatra Selatan.

Karena mengingat mahasiswa adalah salah satu aspek yang mendorong konsep dan tujuan dari pergerakan mahasiswa itu sendiri, berperan dalam mengawal kebenaran dan kontrol sosial pada lingkungan sosial serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu wilayah atau pun negara, juga bahwa pergerakan mahasiswa merupakan gerakan yang selalu bergulir terus menerus dari masa ke masa.



**Beberapa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Fatah, Universitas Sriwijaya, Universitas PGRI, dan Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Tabel 4.1**

<b>No</b>	<b>Mahasiswa UIN Raden Fatah</b>	<b>Keterangan</b>
1	24 September 2019	Aksi unjuk rasa menolak RUU KUHP dan Revisi KPK yang beranggapan akan melemahkan kinerja KPK.
2	7 Oktober 2020	Aksi unjuk rasa menolak disahkannya UU Omnibus Law Ciptakerja yang dianggap merugikan para buruh.
3	18 September 2019	Aksi yang dilakukan di kampus internal mempertanyakan janji peningkatan akreditasi kampus.

4	06 Agustus 2020	Aksi yang dilakukan di kampus internal memintakeringan UKT (uang kuliah tunggal) dikarenakan pandemi COVID-19.
	<b>Mahasiswa Universitas Sriwijaya</b>	<b>Keterangan</b>
1	24 September 2019	Aksi unjuk rasa menolak RUU KUHP dan Revisi KPK yang beranggapan akan melemahkan kinerja KPK.
2	7 Oktober 2020	Aksi unjuk rasa menolak disahkannya UU Omnibus LAW Cipta Kerja yang dianggap merugikan para buruh.
3	17 September 2019	Aksi unjuk rasa mengenai Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) aksi mahasiswa melawan asap berakhir kisruh.
4	08 Agustus 2017	Aksi unjuk rasa di kampus internal memintapenurunan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) berakhir kisruh dan bentrok.

	<b>Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang</b>	<b>Keterangan</b>
1	24 September 2019	Aksi unjuk rasa menolak RUU KUHP dan Revisi KPK yang beranggapan akan melemahkan kinerja KPK.
2	7 Oktober 2020	Aksi unjuk rasa menolak disahkannya UU Omnibus LAW Cipta Kerja yang dianggap merugikan para buruh.
3	30 September 2019	Aksi solidaritas terkait meninggalnya dua mahasiswa di Kendari.
4	14 Agustus 2020	Aksi meminta penurunan biaya uang kuliah tunggal (UKT) 50 persen oleh Mahasiswa Universitas PGRI dan Muhammadiyah.
	<b>Mahasiswa Universitas PGRI Palembang</b>	<b>Keterangan</b>
1	24 September 2019	Aksi unjuk rasa menolak RUU KUHP dan Revisi KPK yang beranggapan akan melemahkan kinerja KPK.

2	7 Oktober 2020	Aksi unjuk rasa menolak disahkannya UU Omnibus LAW Cipta Kerja yang dianggap merugikan para buruh.
3	14 Agustus 2020	Aksi meminta penurunan biaya uang kuliah tunggal (UKT) 50 persen oleh Mahasiswa Universitas PGRI dan Muhammadiyah.

**Sumber :Tribunnews, Sindonews, gatra.com.**

## **B. Pembahasan Analisis**

Seperti halnya partisipasi politik sebagai keikutsertaan kegiatan secara aktif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok orang, dengan melalui jalan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah atau *public policy*.

Aksi mahasiswa terhadap dmeo atau aksi terkait isu internal ataupun eksternal yang bersifat kedaerahan atau berskala nasional di kota Palembang merupakan salah satu jalan melakukan partisipasi politik secara tidak langsung yakni turun ke jalan menjadi penyambung lidah dan jembatan aspirasi suara bagi masyarakat dengan tujuan mempengaruhi kebijakan Negara yang dinilai bertentangan.

Seperti halnya teori yang disampaikan oleh Widjanarko bahwa, partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh warga negara. (Widjanarko, 2004) dan dalam partisipasi politik, aspek yang perlu diperhatikan bukan hanya sikap, tetapi juga kegiatan yang memiliki sifat empiris. Selain itu, partisipasi politik juga merupakan kegiatan masyarakat sipil, artinya orang yang melakukan partisipasi politik adalah orang-orang yang berada di luar ruang lingkup pemerintah.

Pejabat-pejabat pemerintah, pemimpin, anggota legislatif, dan sebagainya bukanlah termasuk sebagai orang melakukan partisipasi politik. Partisipasi politik juga bersifat relatif, artinya ia tidak mementingkan hasil akhir apakah ia berhasil atau tidak

mempengaruhi kebijakan publik. Melainkan keikutsertaan atau keterlibatan saja yang dipentingkan.

Dalam hal ini mahasiswa di Kota Palembang bukanlah mereka yang memiliki kepentingan atau mampu ditunggangi berdasarkan kebijakan yang telah dibuat, beberapa motif yang dilakukan adalah seperti contoh: RUUKPK dan Omnibus Law yang dinilai melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang memiliki fungsi pengawasan bagi para koruptor sehingga ruang geraknya seperti dibatasi oleh beberapa pihak, dan pemerintah justru menyetujui hal itu, begitu pun Omnibus Law yang dinilai tidak Pro dengan rakyat, para pekerja dikuras tenaganya dengan gaji yang kecil, konsep yang digunakan pun seolah-olah hanya mengutamakan kepentingan swasta, dan yang paling krusial adalah isu lingkungan pun ikut turut serta menjadi topic yang disuarakan oleh mahasiswa.

Selain itu, mahasiswa juga ikut serta dalam kegiatan *electoral activity*, *lobbying*, *organization activity*, *contacting*, bahkan ada beberapa mahasiswa yang melakukan tindakan *violence* berupa kekerasan dan pemberontakan, walau tak di setiap aksi menimbulkan keributan, namun di Kota Palembang ada beberapa yang terjadi.

### **C. Faktor –faktor yang Mempengaruhi partisipasi mahasiswa terhadap isu kontemporer:**

Aksi dan reaksi pergerakan mahasiswa yang terlahir di Kota Palembang dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar terutama saat menyikapi masalah. Selain itu, secara prinsip dalam menyikapi realitas yang terjadi bentuk dan aktualisasi dari gerakan mahasiswa cenderung berbeda ketika ditinjau melalui perilaku personal maupun komunal mahasiswa.

Adapun bentuk gerakannya, antara lain melalui dialog terbuka, penyampaian pernyataan sikap, aksi unjuk rasa turun ke jalan, mimbar bebas, aksi pemogokan, sabotase, hingga revolusi secara fisik hingga sosial. Jika ditinjau dari faktor internal yang melandasi gerakan mahasiswa yaitu faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa yang memberi pengaruh dan dorongan yang menjadikan spirit gerakan mahasiswa. Diantaranya adalah aktualisasi keilmuan yang menjadi faktor internal landasan gerak mahasiswa.

Maka, selama proses mencari ilmu dalam bangku perkuliahan, mencari sumber normative melalui buku, mendengarkan materi kuliah umum, atau bincangan dengan dosen yang menjelaskan konsep dan teori di dalam kelas, mata kuliah yang diampu menjadi wacana, serta ikut dalam seminar-seminar dari lembaga eksternal maupun lembaga kemahasiswaan terkait dengan jurusan.

Dalam hal ini, perlu adanya sebuah aksi dan kegiatan yang langsung turun ke jalan yang langsung menyentuh objek serta

realita yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Dan gerakan mahasiswa juga merupakan konsep yang dianut melalui elemen dan semangat dalam berpartisipasi politik yang sifatnya turun dan terjun langsung ke jalan, melalui pembahasan isu yang sedang hangat dan kontemporer yang perlu digoreng dan ditemukan akar pemecahan permasalahannya.

Semangat dan spirit mahasiswa juga sebagai bentuk advokasi yang menjadi “Kobaran Api Perlawanan” dalam membela keadilan dan bagian dari suara publik, rakyat yang terpinggirkan. Disinilah pergerakan mahasiswa diartikan dalam ciri spirit mahasiswa pasca lengsernya pemerintahan orde baru sampai era reformasi saat ini. Selain dari spirit yang ada, mahasiswa juga memiliki modal besar yaitu sebagai cendekiawan muda. Dengan adanya spirit tersebut, maka mahasiswa ditempatkan di tengah-tengah antara masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa dalam birokrasi piramida sosial. Dalam hal tersebut menempatkan mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat dan melalui hal ini mahasiswa memiliki peran netral yang tak mampu ditunggangi siapapun karena atas dasar suara rakyat.

*”Gerakan mahasiswa adalah bentuk kegiatan mahasiswa yang ada baik di dalam maupun di luar kampus sebagai bentuk implementasi tugas dan fungsinya yang pertama agent of change, agent social control, dan iron stock ketiga tupoksi inilah sebagai bentuk implementasi dari gerakan*



*mahasiswa,”* ujar Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang saat diwawancarai Rabu, 13 Januari 2021.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pergerakan mahasiswa di Palembang telah marak disuarakan bahkan sebelum era reformasi. Adapun diantaranya terlihat beberapa aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga peristiwa 1998 yang berhasil melengserkan Soeharto dari 32 tahun kursi kepresidenannya.

Ada waktu yang membatasi status kemahasiswaan yang disadari oleh para aktivis berbagai kampus. Maksudnya yaitu seharusnya waktu yang dipergunakan saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi memiliki batas. Dari hal tersebut membuat mahasiswa secara rela atau tidak, mereka harus meninggalkan kampus segera baik dengan tingkatan diplomasnya atau sarjananya bahkan sampai *drop out*. Lahir dari kesadaran tersebut, para aktivis mahasiswa mendedikasikan ilmunya dengan semangat perlawanan terhadap para penerusnya dari generasi ke generasi.

Proses tersebut dapat disebut sebagai proses kaderisasi yang sistematis, terstruktur dan terukur secara baik dan jelas. Organisasi kemahasiswaan eksternal diantaranya seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Metode perkaderan yang digunakan oleh organisasi eksternal tersebut juga ikut diterapkan dalam organisasi intra kampus, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan

Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) namun dengan kemasan yang berbeda. Tujuan utamanya tidak lain sebagai wadah untuk *transfer of knowledge* dengan pemeliharaan semangat juang dari *senior* kepada *junior*. Pada kegiatan Ospek Mahasiswa lebih pada pengenalan terhadap kampus dengan sistem akademik yang ada di kampus. Bina akrab memiliki tujuan untuk membangun keakraban antara *senior* dengan *junior*. Sedangkan inagurasi merupakan bagian terakhir bagi mahasiswa baru dilantik sebagai mahasiswa.

*“Aksi itu terdapat 2 jenis, ada aksi tuntutan dan aksi mimbar bebas, untuk proses persiapan aksi itu sendiri ada beberapa tahap yang pertama mengamati situasi politik dan keresahan masyarakat, kemudian mengkaji isu tersebut dengan teman-teman eksekutif berbagai universitas, kemudian membentuk konsep aksi dan petugas-petugas inti di dalam aksi dan setiap pergerakan berbeda beda isu yang diangkat yang pasti isu tersebut diangkat karena timbulnya keresahan di masyarakat atau mahasiswa,”* ujar Ketua BEM FKIP UNSRI.

Dapat dikategorikan sebagai berikut. *Pertama*, sifat dari gerakan mahasiswa Palembang umumnya militant dan aktualitas ilmu. Hal tersebut terlihat melalui pola perkaderan dengan mengedepankan internalisasi nilai-nilai dalam OSEPK. Serta dapat dilihat juga dari isu-isu hangat yang terkait.

*“Sebelum melakukan pergerakan ada baiknya kita mengetahui bahwa isu yang akan kita angkat dalam aksi*

*tersebut benar, jangan hanya dengar dari orang yang belum tentu mengetahui fakta yang sebenarnya. Kemudian untuk posisi biasanya kami akan berbagi peran, ada yang naik ke mobil komando, ada yang bertugas sebagai coordinator lapangan, kemudian kawan-kawan yang lain akan berada dalam barisan dan membentuk pola tertentu agar jika terjadi chaos maka mereka akan bisa dengan cepat menyelamatkan diri.*

*Jika pergerakan kita tidak didengarkan sebaiknya kita jangan larut dalam suasana ada baiknya kita tanyakan alasan kembali mengapa pergerakan kita tidak didengarkan jika pergerakan kita memang tidak disetujui minta kejelasannya juga mengapa tidak setuju, namun juga tidak ada kejelasan juga maka mendobrak pintu masuk adalah pilihan terakhir,” ucap Ketua BEM Ekonomi Universitas PGRI.*

*Kedua, secara umum mahasiswa Palembang identik dengan aktualisasi keilmuan dan sifat yang militant. Ketiga, gerakan mahasiswa Palembang didominasi oleh ideologis dan spiritualitasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga poros gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia. Jakarta memiliki karakter politik yang kuat, Yogyakarta dengan intelektualitas dan keilmuannya, serta Makassar dan Palembang memiliki karakter spiritual dan ideologis.*

Ideologis merupakan kata dasar dari ideologi yang merujuk sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Dapat diartikan juga bahwa ideology sebagai teori yang tidak menjadikan kebenaran sebagai orientasi, namun lebih kepada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dapat dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi, dapat disimpulkan ideologis memiliki makna sebuah implementasi dari ideology milik individual atau kelompok.

Menjelaskan makna dari spiritual memiliki kecenderungan bersinggungan dengan masalah keyakinan sampai keagamaan. Spiritualitas disebut sebagai hubungan dengan yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta yang tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh individu. Sedangkan melihat dari sisi etimologinya, spiritual berartihal yang mendasar, penting, serta mampu memberi gerakan dan memimpin cara berpikir dan tingkah laku dari seseorang.

Memiliki hubungan terhadap sesuatu yang tidak tahu dan tidak pasti dalam hidup, menemukan arti dari tujuan hidup, memiliki kesadaran mampu dalam penggunaan sumber dan kekuatan pada diri sendiri, keterikatan antara diri sendiri dengan yang Maha Tinggi. Ideologis dan spiritual melalui penjelasan di atas lebih mengarah pada pola pikir dan pola gerak yang ada pada mahasiswa saat menyikapi realitas sosial pada masyarakat.

*Keempat*, secara garis besar gerakan mahasiswa Palembang cenderung menempatkan diri dengan eksklusifitasan

gerakan yang menyebabkan pola gerakannya parsial. Sehingga seringkali dalam mengawal isu, dibentuk aliansi gerakan yang bersifat sementara atau temporer. Seperti dibentuknya aliansi BEM se-Sumatera Selatan, merupakan gerakan yang sifatnya hanya sementara dan akan berganti sesuai dengan isu yang disikapi.

Lihat Tabel Berikut Yang Menggambarkan Karakteristik Gerakan Mahasiswa Palembang.

Tabel 4.2

**Karakteristik Mahasiswa Universitas Sriwijaya**

<b>No</b>	<b>Karakteristik Gerakan Mahasiswa Universitas Sriwijaya</b>	<b>Indikator</b>
1	Militan	Gerakan mahasiswa UNSRI juga berkarakteristik militan. Karakteristik militan terbentuk dari kaderisasi yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. Seorang mahasiswa baru ketika masuk ke organisasi harus mengikuti 3 tahap kaderisasi. Seperti saat orientasi pengenalan kampus yang biasa dikenal dengan PK2 yang dilakukan oleh lembaga internal kampus (BEM UNSRI dan BEM Fakultas) yaitu seperti PK 2 lapangan, PK2 Ruangan. Selain itu

		<p>beberapa organisasi internal kampus seperti BEM, HMJ, dan UKM juga melakukan hal yang sama. Tahapan pengkaderan seperti Oprec, seleksiawal, wawancara, dan tahap terakhir akan dilakukan Inagurasi, MAKRAB (Malam Keakraban).</p>
2	Intelektual dan Keilmuwan	<p>Gerakan mahasiswa UNSRI juga berkarateristik intelektual dan keilmuwan. Sebelum melakukan aksi biasanya kader-kader dari organisasi akan berdiskusi terlebih dahulu kemudian mengkaji isu terlebih dahulu dan juga membentuk konsepanaksi dan petugas-petugas inti aksi</p>
3	Idelogis dan Spritual	<p>Gerakan mahasiswa UNSRI juga sangat kental dengan sisi Ideologis dan Spritual. Sisi ideologis terlihat dari terbentuk pada saat masa kaderisasi dimana</p>

		<p>memberikan wawasan dan kasih edukasi mengenai ke organisasian ataupun pemahaman dasar mengenai gerakan mahasiswa itu sendiri. Dari sisi spritual, gerakan mahasiswa UNSRI juga menginginkan perubahan secara menyeluruh demi tercapainya aspirasi masyarakat.</p>
4	Politik	<p>Gerakan mahasiswa UNSRI juga sangat kenal dengan sisi spolitik. Sisi politik ini sangat terlihat pada saat sebelum dilakukan aksi terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama mengamati situasi politik dan keresahan masyarakat, kemudian mengkaji Isu tersebut eksekutif berbagai universitas, kemudian membentuk konsep aksi dan petugas-petugas inti dalam aksi</p>



**Tabel 4.3**

**Karakteristik Gerakan Mahasiswa UIN Raden Fatah**

No	Karakteristik Gerakan Mahasiswa UIN Raden Fatah	Indikator
1	Militan	Gerakan mahasiswa UIN RF berkarakteristik militan. Karakteristik militan terbentuk dari kaderisasi yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. Seorang mahasiswa baru ketika masuk ke organisasi harus mengikuti 3 tahap kaderisasi. Tahapan kaderisasi ini juga mengadaptasi pola perkaderan yang dilakukan oleh beberapa organisasi eksternal kampus (HMI, KAMMI, IMM, dll) dalam satu rangkaian kegiatan seperti saat orientasi

		<p>pengenalan kampus yang biasa dikenal dengan PBAK yang dilakukan oleh lembaga internal kampus, yaitu seperti PBAK lapangan, PBAK ruangan dan Inagurasi.</p>
2	Intelektual dan Keilmuwan	<p>Gerakan mahasiswa UIN RF juga berkarateristik intelektual dan keilmuwan. Sebelum melakukan aksi biasanya kader-kader dari organisasi akan diadakan konsolidasi terlebih dahulu. Pada saat konsolidasi tersebut akan dijelaskan mengenai isu-isu yang harus dipahami dan bagaimana peran saat melakukan aksi. Oleh karena itu gerakan mahasiswa di UIN Raden Fatah berkarakteristik intelektual dan</p>

		keilmuwan.
3	Idelogis dan Spritual	Gerakan mahasiswa UIN RF juga sangat kental dengan sisi Ideologis dan Spritual. Sisi ideologis terlihat dari pola gerakan mahasiswa UIN RF yang menyadari bahwa peran mahasiswa selain belajar adalah <i>agent of change</i> , <i>agent of control</i> dan juga <i>Iron Stock</i> . Dari sisi spritual, gerakan mahasiswa UIN RF menginginkan perubahan secara menyeluruh.
4	Politik	Gerakan mahasiswa UIN RF juga sangat kenal dengan sisi politik. Sisi politik ini sangat terlihat pada saat mengangkat dan

		mengkaji isu. Isu-isu yang diangkat haruslah bersumber dari media terpercaya serta isu-isu tersebut harus dikaji terlebih dahulu.
--	--	---

**Tabel 4.4**

**Karakteristik Gerakan Mahasiswa Universitas PGRI Palembang**

No	Karakteristik Gerakan Mahasiswa Universitas PGRI Palembang	Indikator
1	Militan	Gerakan mahasiswa Universitas PGRI juga berkarakteristik militan. Karakteristik militan terbentuk dari kaderisasi yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. Hal ini muncul karena sebagian besar aktivis-aktivis di Universitas Muhammadiyah berasal dari organisasi

		eksternal seperti HMI,PMII dan juga UKM LDK.
2	Intelektual dan Keilmuwan	Gerakan mahasiswa PGRI juga berkarateristik intelektual dan keilmuwan. Sebelum melakukan aksi biasanya akan mengkaji isu yang akan kita angkat dalam aksi tersebut benar.
3	Idelogis dan Spritual	Gerakan mahasiswa UIN RF juga sangat kental dengan sisi Ideologis dan Spritual. Sisi ideologis terlihat dari pola gerakan mahasiswa Universitas PGRI menyadari bahwa peran mahasiswa selain belajar adalah membawa aspirasi masyarakat. Dari sisispritual, gerakan mahasiswa Universitas perubahan secara

		menyeluruh.
4	Politik	Gerakan mahasiswa Universitas PRGI juga sangat kenal dengan sisi politik. Sisi politik ini sangat terlihat pada saat mengangkat dan mengkaji isu. Isu-isu yang diangkat haruslah bersumber dari media terpercaya serta berdasarkan fakta-fakta yang ada.

**Tabel 4.5**

**Karakteristik Gerakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang**

No	Karakteristik Gerakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang	Indikator
1	Militan	Gerakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah juga berkarakteristik militan.

		Karakteristik militant terbentuk dari kaderisasi yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. Sama seperti di 3 universitas lainnya, karakteristik militant dijumpai pada saat pengkaderan. Selain itu peran dari beberapa organisasi eksternal kampus.
2	Intelektual dan Keilmuwan	Gerakan mahasiswa Muhammadiyah juga berkarateristik intelektual dan keilmuwan. Sebelum melakukan aksi biasanya akan mengkaji isu yang akan kita angkat, melakukan diskusi terlebih dahulu serta mengamati.
3	Idelogis dan Spritual	Gerakan mahasiswa Muhammadiyah juga sangat kental dengan sisi Ideologis dan Spritual. Sisi ideologis terlihat dari pola

		<p>gerakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah menyadari bahwa peran mahasiswa memberikan aspirasi serta menerapkan pola-pola pengkaderan dan ideologi di organisasi. Dari sisi spritual, gerakan mahasiswa Universitas perubahan secara menyeluruh.</p>
4	Politik	<p>Gerakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah juga sangat kenal dengan sisi politik. Sisi politik ini sangat terlihat pada saat mengangkat dan mengkaji isu. Isu-isu yang diangkat haruslah bersumber dari media terpercaya serta berdasarkan fakta-fakta yang</p>



		ada.
--	--	------

## **1. Kesadaran Politik**

Faktor ini yang ditinjau melalui partisipasi politik secara aktif yakni turun ke jalan melalui aksi dan demonstrasi menyerukan suara bagi publick menunjukkan yakni mahasiswa memahami kewajiban dan hak sebagai seorang warga negara, mengingat mahasiswa sebagai elemen yang mendorong konsep dan tujuan dari pergerakan mahasiswa dan berperan sebagai pengawal kebenaran dan control sosial terhadap lingkungan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu wilayah maupun negara, pergerakan mahasiswa merupakan suatu pergerakan yang terus bergulir dari masa ke masa.

Selain itu, Mahasiswa memiliki amanah bahwa tugas mahasiswa bukan hanyalah kuliah, atau mengejar prestasi akademik akan tetapi, peka terhadap isu-isu sosial dan politik dengan hal ini kita implementasikan dalam bentuk aksi maupun gerakan mahasiswa.

## **2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah atau Sistem Politik**

Mahasiswa-mahasiswa melihat keresahan keresahan dimana-mana yang terjadi di masyarakat seperti halnya ditetapkan undang-undang Omnibus Law dan Ruuu KPK contohnya. Contoh lain misalnya di suatu daerah kita melihat pemerintah menetapkan undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, masyarakat lalu melakukan aksi dan kita juga harus

melakukan aksi di depan karena mahasiswa di Kota Palembang juga menyadari tugas mahasiswa sebagai *agent of change*, *Social Control*, dan *Iron Stock* dalam mendukung peluang resmi, sumber daya sosial, sosialisasi, kinerja tim sukses dan popularitas calon aktor yang disiapkan untuk terjun ke dunia politik.

Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk mengetahui terkait lingkungan masyarakat dan politik berdasarkan isu-isu kontemporer yang sifatnya esensial, menyangkut minat dan perhatian banyak orang, serta lingkungan tempanya hidup dengan sikap serta kepercayaan yang dapat dipengaruhi atau tidak lewat partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok aksi mahasiswa.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Mahasiswa yang berperan sebagai *agent of change* sering kali mengangkat isu-isu politik sebagai bentuk partisipasi mereka dan peran mereka dalam agen perubahan. Isu-isu politik yang mereka angkat, jelaslah hal-hal yang meresahkan masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi politik nyata yang dilakukan oleh mahasiswa ialah melalui gerakan mahasiswa. Dimilikinya intelektualitas dengan mengenyam pendidikan taraf tinggi membuat kelompok mahasiswa menjadi kritis menjadikan mereka pelaku utama dari gerakan ini.

Walau terkadang tidak selalu menentukan, didalam perubahan sosial gerakan mahasiswa memiliki peran penting di dalamnya. Mahasiswa lebih sering melakukan unjuk rasa atau demonstrasi sebagai metode gerakannya saat mengkritisi kebijakan pemerintah atau pun terkait dengan isu-isu politik yang meresahkan masyarakat. Sebagai bagian gerakan sosial gerakan mahasiswa menghendaki melalui sebuah reformasi adanya perubahan sosial yang terjadi. Gerakan moral dilakukan dalam langkah reformasi dari mahasiswa merupakan identitas yang paling kental berhadapan dengan posisi pendidikan paling lama. Di sisi lain cara memperkuat tuntutan moral agar reformasi

politik terjadi, mahasiswa melakukan gerakan dengan aksi turun ke jalan secara terus menerus.

Setelah orde lama berhasil diruntuhkan melalui gerakan mahasiswa maka munculah era reformasi. Wajah baru Indonesia setelah selama 32 tahun terkurung dalam cengkraman orde lama. Walaupun tiba di era reformasi tidak serta merta kebijakan pemerintahanya suci tanpa perlu dikritisi, dapat diartikan gerakan mahasiswa belumlah berhenti, mahasiswa masih harus menjadi penyambung lidah rakyat.

Di era reformasi, gerakan mahasiswa Indonesia mengalami pasang surut. Model-model gerakan juga beranekaragam, terkadang terlihat stagnan maupun bergerak. Isu-isu politik kontemporer yang diangkat juga mulai beraneka ragam, tidak hanya selalu terkait kebijakan pemerintah, kebijakan kampus yang dinilai tidak pro mahasiswa juga menjadi penyebab mahasiswa melakukan gerakan ataupun aksi. Begitupun juga di Kota Palembang,

Mahasiswa di kota Palembang juga memiliki karakteristik dalam melakukan aksi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua Senat/ BEM empat universitas besar di kota Palembang, yaitu Universitas Islam Raden Fatah, Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas PGRI dapat disimpulkan empat karakteristik pergerakan mahasiswa kota Palembang :

Militan dan aktualisasi ilmu. Dasar tersebut dilihat dari pola perkaderan dengan internalisasi nilai-nilai dalam OSPEK. Selain itu, juga dilihat dari isu-isu kontemporer yang terkait.

Keilmuwan. Dasar tersebut dilihat dari isu-isu hangat atau kontemporer yang diangkat dikaji terlebih dahulu. Ideologis dan Spritual. Sisi ideologis terlihat dari terbentuk pada saat masa kaderisasi dimana memberikan wawasan. Dari sisi spritual ialah menginginkan perubahan secara menyeluruh demi tercapainya aspirasi masyarakat. Parsial. Secara umum gerakan mahasiswa Palembang memiliki kecenderungan untuk menempatkan diri pada sisi eksklusifitas gerakan sehingga pola gerakannya parsial.

Selain karakteristik, partisipasi politik mahasiswa-mahasiswa di kota Palembang juga sangat berperan aktif. Setiap munculnya isu-isu yang meresahkan masyarakat, mahasiswa akan melakukan aksi dengan berbondong-bondong turun ke jalan. Isu-isu kontemporer seperti menolak RUU KUHP dan juga menolak disahkannya OMNIBUS Law juga ikut menjadi perhatian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, mahasiswa-mahasiswa di kota Palembang sangat peka dengan isu-isu kontemporer dan berperan aktif dalam setiap pergerakannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan mahasiswa di Kota Palembang ialah : Kesadaran Berpolitik Kepercayaan Terhadap Pemerintah atau Sistem Politik

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas maka, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang melakukan aksi atau partisipasi politik hendaknya memahami isu yang disuarakan, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, tindakan dalam aksi pun harus selalu damai dan terus disuarakan dengan menerapkan ilmu yang diajarkan lewat teori maupun penjelasan baik dari organisasi maupun melalui dosen.

2. Bagi Pemerintah

Melalui aksi yang dilakukan oleh mahasiswa hendaknya dilakukan pengevaluasian, bukan hanya sekedar didengar, semoga melalui penelitian ini pemerintah bisa mengetahui bahwa mahasiswa ada di Kota Palembang dominan mengetahui isu-isu kontemporer terbaru dan paham dengan apa yang mereka suarakan, dan semoga melalui penelitian itu pemerintah jadi lebih peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat sehingga tidak sembarangan mengatur kebijakan dan penuh dengan pertimbangan dan memikirkan berbagai pihak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga penelitian ini mampu menjadi referensi untuk mengembangkan dan mengetahui riset melalui penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Anwar. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*, Depok :Raja Grafindo Persada
- Herbet Mc Closky, (1972).*Political Participation*, New York : International Encyclopedia of the social
- Martono, Nanang. (2016). *Metode penelitian sosial*,Jakarta:Rajawali Pers.
- Noor, Juliansyah. (2017). *Metodologi penelitian*.Jakarta : Kencana.
- Poloma, Margareth. (2004). *Sosiologi Kontemporer*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Ramlan Subakti, (2010). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Pt Gramedia Widisarana Indonesia.
- Rusfiana, Yudi dan Nurdin, Ismail, (2017). *Dinamika Politik Kontemporer*. Bandung:Pt. Penerbit Alfabeta.Indonesia.
- Samuel P. Huntington& Joan M. Nelson, (1984). *Partisipasi Politik tidak ada ada pilihan muda*, Jakarta: Pt Sangkalapasar.
- Sadikin, Basrowi.(2002). *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: InsanCendekia.
- Soebandrio.(2001).*Kesaksianku tentang G-30-S*, Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total.

Sugiyono.(2017).Metode penelitian,Bandung:Alfabet.

Sutopo.(2002). Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sutrisman, Dudih.(2019). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa. Jakarta :Guepedia Publisher.

Supriyanto, Enim .(1999). Menolak Menunduk Menentang Budaya Represif. Jakarta : PT Grasindo.

TarehRasyidi, (2017). *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Idea Press.

William A Darity Jr, (2008). *InternasionalEnsklopedia of the social science*, USA: Couse Technologi.

### **Skripsi**

Fuadi. (2014). *Citra Organisasi Pergerakan Mahasiswa Paska Reformasi Politik Indonesia*. Universitas Diponegoro:Semarang.

Indra, & Aqar, R. B. (2015). *No TitleReda Bayu Aqar Indra* .Universitas Airlangga :Surabaya.

Prawista. (2011). “*Gerakan Mahasiswa Makassar*”. Makassar :Universitas Hasanuddin.

### **Jurnal**

Pratama, Y., Suntoro, I., & Yunisca, N. (2018). Peranan Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme . *Jurnal Kultur Demokrasi* 5(13), Hal 5-10 .

Jurnal Ilmu pemerintahan partisipasi issn 2442-5958, Eissn 2540-8674. 308 Vol.2 no.02.

Wanto, Haris Alfi. Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *Jurnal Pelayanan Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.*

### **Internet**

Yoga Sukmana. (2018). *Rezim Soekarno soeharto dalam hal ekonomi.* Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/jeo/rezim-soekarno-soeharto-dan-20-tahun-reformasi-dalam-hal-ekonomipada tanggal 2 juli 2019>.

Eko. (2019). Pelaksanaan Pemilu Serentak dinilai terburuk. Diakses melalui <https://suarapalu.com/pelaksanaan-pemilu-serentak-2019-dinilai-terburuk/> pada tanggal 20 Februari 2020.

Kompas.2018. 21 Mei 1998 saat Soeharto dijatuhkan gerakan reformasi. Diakses melalui <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/05/21/06480851/21-mei-1998-saat-soeharto-dijatuhkan-gerakan-reformasi pada tanggal 1 april 2020>).

Detik News, 2020 Sumsel Bergerak Mahasiswa Palembang Turun ke Jalan Demo Tolak RKUHP diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4718879/sumsel-bergerak-mahasiswa-palembang-turun-ke-jalan-demo-tolak-rkuhp>

Kompas,10.000 Orang Gelar Aksi Demo 100 Hari Pemerintahan SBY diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2010/01/27/10302088/~Regional~Jawa>.

Liputan6 News, Mahasiswa Mendesak Presiden Megawati Mundur diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/48140/mahasiswa-mendesak-presiden-megawati-mundur>.

Tirto.id, Apa penyebab demo mahasiswa dan buruh pada 8 Oktober 2020 diakses melalui <https://tirto.id/apa-penyebab-demo-mahasiswa-dan-buruh-pada-8-oktober-2020-f5Ju>

# LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B. 25 /Un.09/VIII/PP.01/01/2021  
Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
  3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Irvan Meidiansyah*, tanggal 17 April 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
  2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
  3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
  4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
  5. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2018;

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN:**

Pertama : Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Ainur Ropik, M.Si.	197906192007101005	Pembimbing I
Mariatul Qibtiyah, MA.Si.	2011049001	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Irvan Meidiansyah  
N I M : 1617020050  
Prodi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi :

**"Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demonstran."**

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 06 Januari 2021 s/d 06 Januari 2022

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Tembusan:**

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2) ;
4. Ketua Prodi Ilmu Politik ;
5. Arsip ;





# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : 8.821/UIN-IR/VIII/PP-01/08/2020

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
  - Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
  - Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **a.n. Muhammad Shandika Putra, Tanggal 22 Mei 2020**
- MENGINGAT :**
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 tahun 2000
  - Instruksi Direktur Bimbingan Islam Departemen RI Nomor KEPE/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
  - Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
  - Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
  - Kep Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

Peramu: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	197201192007011011	Pembimbing I
Hatta Anzuhlri, M.Si	2016028804	Pembimbing II

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa/fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

N a m a	Muhammad Shandika Putra
N I M	1657020069
Prodi	Ilmu Politik
Judul Skripsi	"Pasifisme Mahasiswa Terhadap isu Politik Kontemporer (Studi Kasus di beberapa Universitas di Palembang)"

Masa bimbingan:

Kedua :

Ketiga :

Satu Tahun TMT. 6 Agustus 2020 s.d 6 Agustus 2021

Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/Kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang 6 Agustus 2020

Tembusan:

- Rector
- Dosen/Perangkat Akademik yang bersangkutan
- Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
- Ketua Prodi Ilmu Politik
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Asip

Dekan,

